



## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 372.1 /I.10/HK/2025

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, maka maka perlu ditetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX dan lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Padatanggal 14 Agustus 2025  
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

**RENCANA AKSI RB GENERAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	mengevaluasi Sistem Kerja pada Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah laporan hasil evaluasi sistem kerja pada Perangkat Daerah	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,2	Melakukan Penginputan Penilaian Mandiri Indeks SPBE Tahun 2025 Melalui Aplikasi Tauval SPBE	Nilai Indeks	Jumlah laporan hasil Penilaian Mandiri Indeks SPBE	-	-	-	1	1	150.934.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang SPBE
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	Melakukan reviu Arsitektur SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Arsitektur SPBE	-	-	-	1	1	85.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang SPBE
	Indeks Perencanaan Pembangunan	85	Penyusunan dokumen perencanaan diselaraskan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait.	Kegiatan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan diselaraskan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait	0	1	1	0	2	1.731.360.850	BAPPEDA	
			Asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sasaran kabupaten	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sasaran kabupaten	0	53	53	0	53	389.108.850	BAPPEDA	Seluruh OPD

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	70,01 (BB)	Perbaikan perencanaan kinerja pada RPJMD periode 2025-2029	dokumen	Jumlah dokumen RPJMD yang tersusun	0	0	1	0	1	115.184.000	BAPPEDA	BAPPEDA
			Perbaikan perencanaan kinerja pada RENSTRA periode 2025-2029 dengan perumusan tujuan, outcome, dan indikator yang diupayakan selaras dengan Inmendagri no 2 tahun 2025.	Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA yang tersusun	-	-	53	-	53	1.870.754.450	BAPPEDA	OPD
			Penyusunan SK IKU dengan mencantumkan definisi operasional	dokumen	Dokumen IKU Kabupaten yang mencantumkan definisi operasional	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Penyusunan PK sesuai dokumen perencanaan	dokumen	Perjanjian Kinerja Kepala Daerah sesuai dokumen perencanaan	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Menyusun pohon kinerja di tingkat Kabupaten sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja dokumen perencanaan dan penyusunan pohon kinerja untuk perencanaan pembangunan tematik (Agroeduwisata)	Pohon kinerja	Jumlah pohon kinerja yang tersusun	-	-	10	-	10	-	BAPPEDA	BAPPEDA
			Menyusun pohon kinerja per sektor (Perangkat Daerah)	Pohon kinerja	Jumlah pohon kinerja yang tersusun	-	-	53	-	53	-	BAPPEDA	Perangkat Daerah
			Menyelaraskan sasaran kabupaten dengan program Perangkat Daerah melalui SIPD (tabel 3.9 RPJMD)	Dokumen (tabel 3.9)	Jumlah dokumen/tabel penyelarasan sasaran dengan program di SIPD	-	-	1	-	1	-	BAPPEDA	BAPPEDA

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			Penyusunan SKP selaras dengan kinerja Perangkat Daerah	Data	Jumlah ASN yang menginput SKP melalui E-Kinerja	6600	6600	6600	6600	6600	60.759.150,00	BKD	seluruh Perangkat Daerah
			Menyusun laporan Evaluasi Renja;	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan evaluasi renja	53	53	53	53	53	-	BAPPEDA	seluruh Perangkat Daerah
			Menyusun laporan Implementasi Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan implementasi renca aksi	53	53	53	53	53	-	Bagian Organisasi	seluruh Perangkat Daerah
			Menyusun laporan Evaluasi RKPD dan monitoring Evaluasi Renja	kali	Jumlah laporan Evaluasi RKPD	1	1	1	1	4	-	BAPPEDA	BAPPEDA
					Jumlah monitoring evaluasi renja PD	1	1	1	1	4	-	BAPPEDA	OPD
			Melakukan monitoring Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Aksi	53	53	53	53	53	-	Bagian Organisasi	seluruh Perangkat Daerah
			Penggunaan SIPD dalam perencanaan kinerja dan keuangan	kegiatan	Jumlah proses input data dan informasi perencanaan di SIPD (RKPD murni, RKPD Perubahan, RPJMD)	-	2	1	-	3	-	BAPPEDA	BAPPEDA
			Penggunaan SIPD dalam Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan	%	Persentase perangkat daerah yang menggunakan SIPD dalam penyusunan anggaran dan Penatausahaan Keuangan	100	100	100	100	100	326.687.650	BPKAD	seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan peningkatan kompetensi APIP melalui Bimtek Evaluasi SAKIP	Orang	Jumlah evaluator yang mengikuti Bimtek	-	47	-	-	47	26.690.000,00	Inspektorat	
			Mengimplementasikan Aplikasi SEBESI AKIP	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang	-	53	-	-	53	-	Inspektorat	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			dalam evaluasi AKIP Internal Tahun 2025		dilakukan evaluasi melalui Aplikasi SEBESI AKIP								
			Melakukan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Internal kepada seluruh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi	-	-	53	-	53	-	Inspektorat	
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	1	Pembinaan dan Pemantauan Zona Intergritas ke PD	Satker/Unit Kerja	Jumlah Saker atau unit kerja yang dilakukan pembangunan unit kerja dan pemantauan Zona Intergritas	7	7	-	-	7	24.480.0009	Inspektorat	PD yg mengikuti Zona Integritas
			Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh TPI	Satker/Unit Kerja	Jumlah Satker/unit kerja yang diusulkan ke TPN	-	6	-	-	6	24.480.0009	Inspektorat	PD yg mengikuti Zona Integritas
			Sosialisasi pembangunan zona integritas	Satker/Unit Kerja	Jumlah Satker/unit kerja yang dilakukan Sosialisasi zona integritas menuju WBK	-	-	-	34	34	-	Inspektorat	PD yg mengikuti Zona Integritas
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.16 (Level 3 / Terdefinisi)	Pelaksanaan Bimbingan Teknis SPIP terintegrasi	Kegiatan	Jumlah Bimbingan Teknis SPIP terintegrasi	-	-	1	-	1	18.700.000,00	Inspektorat	
			Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Laporan	Jumlah PD melakukan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1	14.265.000,00	Inspektorat	
			Pelaksanaan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	Laporan	Jumlah PD melakukan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi	-	1	-	-	1	19.465.000,00	Inspektorat	

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	3	Sosialisasi dan Pemantauan e lapor	laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Perangkat Daerah atas pengaduan yang masuk pada aplikasi lapor.go.id	-	-	1	-	1	17.845.450	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi Publik
				Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi	-	-	53	-	53	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi Publik
			Menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan	Dokumen	Pengesahan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan	-	-	1	-	1	17.845.450	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi Publik
			Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pengaduan E Lapor	Dokumen	Pengesahan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	1	1	17.845.450	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Informasi Publik
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78,0 (terjaga)	Sosialisasi SPI kepada pengguna Internal, Eksternal dan Eksper	Kali	Jumlah Sosialisasi SPI kepada pengguna Internal, External dan Expert	-	1	1	-	2	44.380.950,00	Inspektorat	
			Koordinasi pelaksanaan SPI dg Tim Koorsubgah KPK di Kab Lam-Sel	kali	Jumlah Koordinasi pelaksanaan SPI dg KPK	-	-	-	1	1	-		
			Pemantauan progres pengisian SPI	kali	Jumlah Pemantauan progres pengisian SPI	-	-	2	1	3	-		
Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	65	Mengadakan pertemuan rutin untuk menyalaraksan prioritas , menyusun roadmap bersama yang mengintegrasikan tujuan kualitas kebijakan	Rapat	Terususunnya hasil kebijakan yang akurat dan relevan	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan sosialisasi prinsip-prinsip tata kelola kebijakan	Jumlah	tercapianya tata kelola kebijakan di	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			kepada seluruh pemangku		Perangkat Daerah								
			Pembentukan Tim dan Penetapan Kerangka kerja	jumlah	Tercapainya Hasil Kebijakan yang dianalisis secara objektif, sistematis, dan komprehensif	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
			Melakukan rapat bulanan utuk mengevaluasi hasil kebijakan dan kinerja staf	kali	Terlaksanya Penilaian mandiri oleh atasan	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
			Pembentukan Tim kerja lintas Fungsional	jumlah	Tercapainya proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	80	Terbentuknya Perpustakaan Hukum	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	-	-	1	-	1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Melakukan Kunjungan ke BPHN Pusat Dalam Rangka Penilaian E-Report JDIH	Laporan	Laporan E=Report	-	-	-	1	1	7.603.731	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Mengirimkan Terjemahan Perda Nomor 6 Tahun 2024 ke Dirjen PerUU Kemenkum untuk menjadi terjemahan resmi E-Report	Dokumen	Terjemahan	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Menyusun Peraturan Bupati/Perkada tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum	Perbup	Terbentuknya Perbup/Perkada	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Menyusun SOP pembuatan Produk Hukum Daerah (Perda, Perkada dan Keputusan Bupati Lampung selatan)	Jumlah	Jumlah SOP	-	-	3	-	3	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Mengadakan Sosialisasi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Terutama Produk Hukum Daerah melalui zoom meeting	Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi	-	-	-	1	1	-	Bagian Hukum	Bagian Hukum

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	66%	Penerapan Aplikasi Srikandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Bimbingan Teknis	5	5	5	5	20	31.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Pembinaan Arsip Dinamis
			Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Dokumen	Jumlah Dokumen yang diunggah ke SIKN/JIKN	10	10	15	15	50	17.509.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Pengelolaan Arsip Statis
			Melaksanakan Pelatihan untuk Operator Srikandi	orang	Jumlah Peserta Pelatihan		100			100	30.497.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Pembinaan Arsip Dinamis
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,6	Melakukan Penginputan Indek Statistik	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian IPS	-	-	-	1	1	111.092.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Statistik
			Melakukan Penginputan Indek Statistik	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian IPS	-	-	-	1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Statistik
			Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	Jumlah SOP yang disusun	-	-	-	1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Statistik
			Menyusun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	Jumlah dokumen metadata	-	-	-	1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Statistik
			Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral	Laporan	Jumlah OPD yang dibina	-	-	-	1	1	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Statistik
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	88 (Predikat Baik)	Pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non Purchasing, Toko Daring dan E-Kontrak)	skor	Capaian Pemanfaatan sistem pengadaan (SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non Purchasing, Toko Daring dan E-Kontrak)	-	-	-	88	88	188000000	Bagian PBJ	Seluruh PD
		10	Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Ahli pertama	Orang	Uji Kompetensi bagi perpindahan jabatan lain ke jabatan	-	-	-	10	10	-	Bagian PBJ	Bagian PBJ
		40	Menetapkan kebijakan untuk	persentase	Persentase komitmen PDN	-	-	-	40	40	-	Bagian PBJ	Bagian PBJ

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			menggunakan produk dalam negeri		Kab Lampung Selatan								
Penguatan Pegelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta dokumen Penjabaran APBD	Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	1	1	2	1.442.674.100	BPKAD	Seluruh unit kerja
			Mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	-	-	1	2	59.167.450	BPKAD	Seluruh unit kerja
			Melaksanakan Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan seluruh Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	-	2	-	-	2	345.559.200	BPKAD	Seluruh unit kerja
			Melaksanakan koordinasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh Perangkat Daerah secara berkala setiap semester	Persentase	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	-	100%	-	100%	100%	317.046.100	BPKAD	Seluruh unit kerja
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	85%	Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut atas temuan BPK RI	Laporan	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah	-	1	-	1	2	16.340.000,00	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
				Laporan	pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan BPK	-	1	-	1	2	57.520.000,00	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
Penguatan Sistem Merit (Integrasi)	Indeks Sistem Merit	175	Menyusun SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap	Kegiatan	Peningkatan pemahaman tim			100			-	BKD	Semua Eselon II

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional)			penetapan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan;		pengelola sistem merit								
		100 orang	Melaksanakan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya;	orang	Profil kompetensi Jabatan Administrator				100 orang	100 orang	1.469.316.200	BKD	Semua Eselon III
		6 Kegiatan	Melaksanakan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi (hasil asesmen atau uji kompetensi) dan	Kegiatan	Jumlah kegiatan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan		BKD	Seluruh PD
		50 orang	Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai baik metode klasikal maupun nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai;	orang	Jumlah pegawai yang dilakukan pengembangan kompetensi melalui metode klasikal maupun nonklasikal			50 Orang	50 Orang	315.282.300,00	BKD	Seluruh PD	
		3 Kegiatan	Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut	Kegiatan	Memperoleh nilai poin yang meningkat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	54.774.000,00	BKD	Seluruh PD	
		<sup>4</sup> Dokumen	Memetakan seluruh Jabatan Fungsional di Unit Kerja dengan	Dokumen	Dokumen Jabatan Fungsional di	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<sup>4</sup> Dokumen	55,053,750	1. BKD 2. Bagian Organisasi	Seluruh PD

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			Data Riil sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya		Unit Kerja dengan Data Riil sesuai dengan keahliannya dan pendidikannya						349,500,000		
		200 Orang	Melakukan fasilitasi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah pegawai yang berubah status jenjang Jabatan Fungsional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	200 Orang			Seluruh PD
		100 Orang	Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah pegawai yang berubah status jenjang Jabatan Fungsional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	40 Orang	100 Orang			Seluruh PD
		1 Perbup	Membuat regulasi pelaksanaan manajemen talenta pegawai	Dokumen	Peraturan Kepala Daerah tentang manajemen talenta	1 Perbup				1 Perbup	60,759,150	BKD	Seluruh PD
		100 Orang	Pemetaan jabatan eselon III melalui asesmen	Dokumen	Dokumen hasil pemetaan jabatan eselon III melalui asesmen					100 Orang			Seluruh Esselon III
		90 %	Monitoring implementasi Penilaian Kinerja melalui E-KINERJA setiap triwulan	Kegiatan	Jumlah capaian ASN yang telah melakukan Input Data Kinerja melalui E-KINERJA setiap triwulan	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %	60,759,150	BKD	Seluruh PD
		90 %	Persentase jumlah ASN dengan nilai SKP E-Kinerja minimal "BAIK"	Dokumen	Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %			Seluruh PD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlik	66,20 (cukup sehat)	Rapat Pembentukan SK Tim Survei Implementasi Core Values ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen SK Tim Survei Implementasi Core Values ASN	-	-	-	1	1	14,973,275.00	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Pembentuknya SK Buapati Lampung Selotan tentang Tim Survei Implementasi Core Values ASN	Dokumen	Dokumen SK Buapati Lampung Selotan tentang Tim Survei Implementasi Core Values ASN	-	-	-	1	1	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,90 (sangat baik)	Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan	Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah UPP yang melaksanakan Survey Kepuasan	-	-	-	10	10	14,648,850	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
					Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan								
	Indeks Pelayanan Publik	3,95 (B)	Peningkatan hasil Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik pada penyelenggaraan layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	-	-	-	3	3	14,648,850	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	86,75 (B)	Peningkatan hasil Standar Pelayanan Publik	Jumlah	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	-	-	-	1	1	14,648,850	Bagian Organisasi	Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

RENCANA AKSI RB PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total					Koordinator
<b>RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN</b> <b>SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF</b> <b>INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN</b>																	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih banyak anak yang putus sekolah	Siswa SD Miskin	Jumlah peserta Didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	124 Siswa	Bantuan Beasiswa SD	Siswa	Jumlah Siswa Miskin	-	124	-	-	124	Terkait langsung	186.000.000	BAPPEDA	Dinas Pendidikan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih banyak anak yang putus sekolah	Siswa SMP Miskin	Jumlah peserta Didik sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	35 Siswa	Bantuan Beasiswa SMP	Siswa	Jumlah Siswa Miskin	-	35	-	-	35	Terkait langsung	70.000.000	BAPPEDA	Dinas Pendidikan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih ada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	106.884 orang	Penjaminan Pembiayaan Kesehatan	Orang	Jumlah orang yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan	106.884	106.884	106.884	106.884	106884	Terkait langsung	44.452.799.999	BAPPEDA	Dinas Kesehatan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih ada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12069 orang	Penjaminan Pembiayaan Kesehatan	Orang	Jumlah orang yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan	12.069	12.069	12.069	12.069	12069	Terkait langsung	5.474.278.409	BAPPEDA	Dinas Kesehatan	
Meningkatkan Pendapatan	Masih ada pelaku industri yang tidak mengetahui komposisi pangan yang baik	Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	50 orang	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Orang	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	-	-	50	-	50	Terkait langsung	316.515.150	BAPPEDA	Dinas Kesehatan	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

			Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
Meningkatkan Pendapatan	Masih ada nelayan yang tidak memiliki alat keselamatan	Kelompok nelayan (KUB)	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	60 orang	Bantuan Life Jacket/ Baju Pelampung untuk keselamatan kerja dan perlindungan nelayan di laut	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan life jacket untuk keselamatan kerja dan perlindungan nelayan di laut	-	60	-	-	60	Terkait langsung	15.000.000	BAPPEDA	Dinas Perikanan	
Meningkatkan Pendapatan	Masih kurangnya pengetahuan kelompok dalam budidaya ikan air tawar	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	70 Orang	Hibah Pengadaan Sarana Budidaya Air Tawar Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan hibah pengadaan sarana budidaya air tawar untuk program penanggulangan kemiskinan	-	-	60	-	60	Terkait langsung	280.000.000	BAPPEDA	Dinas Perikanan	
Meningkatkan Pendapatan	Masih kurangnya pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan	Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Pembinaan dan Sosialisasi BUDIKDAMBER untuk keluarga miskin	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan dan Sosialisasi BUDIKDAMBER untuk keluarga miskin	-	-	30	-	30	Terkait langsung	14.171.050	BAPPEDA	Dinas Perikanan	
Meningkatkan Pendapatan	Pemanfaatan Pekarangan untuk ketahanan pangan	Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Belanja Budikdamber untuk 30 Keluarga Miskin (P3KE)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Budikdamber	-	-	30	-	30	Terkait langsung	30.000.000	BAPPEDA	Dinas Perikanan	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total				Koordinator

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Meningkatkan Pendapatan	Pemanfaatan Pekarangan untuk ketahanan pangan	Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Pembinaan dan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan dalam Terpal untuk keluarga miskin P3KE (10 Peserta)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan Teknis Budidaya Ikan dalam Terpal untuk keluarga miskin P3KE	-	-	10	-	10	Terkait langsung	10.828.950	BAPPEDA	Dinas Perikanan
Meningkatkan Pendapatan	Pemanfaatan Pekarangan untuk ketahanan pangan	Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Paket Budidaya Kolam Terpal untuk 10 Keluarga Miskin (P3KE)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan paket budidaya kolam terpal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	30.000.000	BAPPEDA	Dinas Perikanan
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Kurangnya pemenuhan kebutuhan protein masyarakat	Masyarakat Miskin	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	Ikan konsumsi untuk masyarakat miskin	Orang	Jumlah orang yang meningkat ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	-	-	50	-	50	Terkait langsung	15.000.000	BAPPEDA	Dinas Perikanan
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat khususnya ibu-ibu dan remaja putri	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	Pelatihan Sulam Tapis	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan sulam tapis	-	-	20	-	20	Terkait langsung	51.409.000	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang	House Keeping	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan house keeping	-	-	10	-	10	Terkait langsung	73.927.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	Barista	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan barista	-	-	30	-	30	Terkait langsung	83.445.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	Komputer	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan komputer	-	-	32	-	32	Terkait langsung	188.503.450	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	Waiters	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan waiters	-	-	20	-	20	Terkait langsung	66.061.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	7 Orang	CPMI	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan CPMI	-	-	7	-	7	Terkait langsung	75.927.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang	F&B	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan F&B	-	-	10	-	10	Terkait langsung	196.033.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan untuk melamar pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10 Orang	Pemagangan	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan pemagangan	-	-	10	-	10	Terkait langsung	141.016.500	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan Pendapatan	Minimnya Lapangan Pekerjaan	Masyarakat Usia Produktif	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Mengadakan kegiatan Job Fair / Bursa Kerja bekerja sama dengan perusahaan di wilayah Kab. Lampung Selatan masyarakat / Pencari Kerja di Kabupaten Lampung Selatan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti job fair	-	-	100	-	100	Terkait langsung	212.638.800	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengurangan Beban	Pemenuhan Jaminan	Pekerja Rentan & Non ASN	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,	8929 Orang	BPJS Ketenagakerjaan untuk THLS dan Pekerja Rentan Pemerintah Daerah	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk THLS dan	8929	-	-	-	8929	Terkait langsung	1.130.625.750	BAPPEDA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**  
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Pengeluaran Masyarakat	Keselamatan Kerja		Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Kabupaten Lampung Selatan		Pekerja Rentan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan										
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1700 Orang	Mengadakan Pelayanan KB gratis Kepada masyarakat	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan KB gratis Kepada masyarakat	1700	-	-	-	1700	Terkait langsung	234.090.000	BAPPEDA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Kewaspadaan Pangan	Keluarga rentan rawan pangan miskin	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	490 Orang	Bantuan Bahan Pangan (paket sembako) untuk rumah tangga rentan rawan pangan miskin	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan bahan pangan (paket sembako) untuk rumah tangga rentan rawan pangan miskin	-	490	-	-	490	Terkait langsung	112.700.000	BAPPEDA	Dinas Ketahanan Pangan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Antisipasi Kenaikan Harga Pangan	Masyarakat berpenghasilan Rendah	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1700 Orang	Kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) dan pemberian subsidi harga pada kegiatan gpm	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan subsidi harga pada kegiatan gpm	-	1700	-	-	1700	Terkait langsung	77.500.000	BAPPEDA	Dinas Ketahanan Pangan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Antisipasi Kenaikan Harga Pangan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1300 warga	Fasilitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (sewa tenda, meja , kursi, banner, sound system, bantuan transport, publikasi dan paket takjil)	Warga	Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	1300	-	-	-	1300	Terkait langsung	22.000.000	BAPPEDA	Dinas Ketahanan Pangan	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Kewaspadaan Pangan	KPM Rumah Tangga yang masuk kelompok Data DTSEN	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	106.415 PBP	Bantuan Pangan (Beras)	PBP	Jumlah masyarakat yang mendapatkan PBP	-	-	106415	-	106415	Terkait langsung		BAPPEDA	Dinas Ketahanan Pangan	
Meningkatkan Pendapatan	Mengurangi Penganguran	Kelompok Tani (Minimal 20)	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah	7 lokus kemiskinan	pengadaan bibit ternak sapi, Kambing & ayam petelur	Kelompok Tani (Minimal)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan	-	-	-	7	7	Terkait langsung	1.761.290.400	BAPPEDA	Dinas Peternakan	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

		Orang /Kelompok)	kabupaten/kota lain			20 Orang /Kelompok)	bibit ternak sapi, Kambing & ayam petelur									dan Kesehatan Hewan
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya Peralatan pertanian yang memadai	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	17 kelompok	Pengadaan Chooper	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	Jumlah kelompok yang mendapatkan chopper	-	-	-	17	17	Terkait langsung	94.908.500	BAPPEDA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Kondisi Jalan Usaha Tani yang rusak	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 kelompok	Jalan Usaha Peternakan	Kelompok Tani (Minimal 20 Orang /Kelompok)	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	2	2	Terkait langsung	460.000.000	BAPPEDA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Menurunkan Beban Pengeluaran	Kurangnya pemenuhan kebutuhan protein pada anak sekolah	Siswa Sekolah	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	920 Butir	Bantuan Telur Ayam	Siswa Sekolah	Jumlah siswa sekolah yang mendapatkan telur ayam	-	920	-	-	920	Terkait langsung	32.693.100	BAPPEDA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Kondisi Jalan Usaha Tani yang rusak	Poktan / Gapoktan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Ruas	Pembangunan JUT	Poktan / Gapoktan	Jumlah poktan yang mendapatkan JUT	-	-	1	-	1	Tidak Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	kondisi rumah korban bencana yang rusak	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	17 unit	rumah korban bencana yang ditangani	unit	Jumlah warga yang mendapatkan bantuan rumah akibat bencana	-	-	17	-	17	Terkait langsung	385.000.000	BAPPEDA	Dinas Perumahan dan Permukiman
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Kondisi rumah masyarakat yang tidak layak huni	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	unit	Jumlah warga yang mendapatkan RTLH	-	-	10	-	10	Terkait langsung	251.913.000	BAPPEDA	Dinas Perumahan dan Permukiman
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Kondisi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	405 unit	Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	unit	Jumlah warga yang mendapatkan RTLH	-	-	405	-	405	Terkait langsung	8.777.375.300	BAPPEDA	Dinas Perumahan dan Permukiman

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki														
Meningkatkan Pendapatan	Masih rendahnya pendapatan dan kurangnya peralatan yang mendukung untuk pelaku industri rumahan	Kelompok IR (Industri Rumahan)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Sosialisasi dan Pemberian Bantuan Berupa Barang yang diserahkan kepada masyarakat	orang	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi dan pemberian bantuan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat	-	-	25	-	25	Terkait langsung	17.815.000	BAPPEDA	Dinas PPPA	
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya informasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas keluarga	Masyarakat Miskin Ekstrem	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Pembinaan, Sosialisasi, Bantuan	orang	Jumlah orang yang melakukan pembinaan, sosialisasi, bantuan	-	-	50	-	50	Terkait langsung	80.044.300	BAPPEDA	Dinas PPPA	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Banyaknya fakir miskin yang perlu mendapatkan bantuan sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	237178 KK	Pendataan Jumlah Fakir Miskin yang akan mendapatkan Bantuan Sosial dari kementerian Sosial RI serta biaya operasional pengelolaan data penerima bantuan sosial	KK	Jumlah KK yang melakukan pendataan jumlah fakir miskin	237178	-	-	-	237178	Terkait langsung	120.000.000	BAPPEDA	Dinas Sosial	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Banyaknya fakir miskin yang perlu mendapatkan bantuan sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	53286 KK	Pengelolaan Data Fakir Miskin yang akan mendapatkan Bantuan Sosial dari kementerian Sosial RI serta biaya operasional pengelolaan data penerima bantuan sosial	KK	Jumlah KK yang diolah data fakir miskin	53286	-	-	-	53286	Terkait langsung	464.981.500	BAPPEDA	Dinas Sosial	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Petani tembakau yang perlu mendapatkan bantuan sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	40 petani	Bantuan Sosial dalam bentuk uang bagi Petani Tembakau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	petani	Jumlah petani yang mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk uang bagi petani tembakau	-	-	40	-	40	Terkait langsung	87.657.200	BAPPEDA	Dinas Sosial	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih tingginya angka stunting di Lampung Selatan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	53286 KK	Sosialisasi P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga ) / Family Development Session (FDS) bagi KPM Penerima Bantuan Sosial PKH dalam rangka pencegahan stunting	KK	Jumlah KPM yang mendapatkan Sosialisasi P2K2 / Family Development Session bagi KPM Penerima Bantuan Sosial PKH dalam rangka pencegahan stunting	53286	-	-	-	53286	Terkait langsung	32.608.500	BAPPEDA	Dinas Sosial
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih tingginya angka kemiskinan di lampung Selatan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	53286 KK	Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (APBN)	KK	Jumlah KK yang mendapatkan bantuan sosial Keluarga Harapan (PKH)	53286	-	-	-	53286	Terkait langsung	106.145.712.000	BAPPEDA	Dinas Sosial
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih tingginya angka kemiskinan di lampung Selatan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	98046 KK	Bantuan Sosial Sembako Kementrian Sosial ( APBN)	KK	Jumlah KK yang mendapatkan bantuan sosial sembako	98046	-	-	-	98046	Terkait langsung	235.310.400.000	BAPPEDA	Dinas Sosial
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak terlantar, disabilitas, lansia	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang (Anak Terlantar, Disabilitas dan Lansia) 120 Lansia Lomba Desa	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	Jumlah orang dan lansia yang mendapatkan bantuan permakanan	-	270	-	-	270	Terkait langsung	114.000.000	BAPPEDA	Dinas Sosial
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan pangan bagi orang lanjut usia yang terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	40 Oang Lansia di Lomba Desa	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	Jumlah orang lansia yang mendapatkan bantuan permakanan	-	-	40	-	40	Terkait langsung	52.200.000	BAPPEDA	Dinas Sosial

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

			Kewenangan Kabupaten/Kota														
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan pangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	Bantuan Permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	Jumlah orang lansia yang mendapatkan bantuan permakanan	95	-	-	-	95	Terkait langsung	293.479.100	BAPPEDA	Dinas Sosial	
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Kenaikan harga kebutuhan pokok	Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8500 Orang	Pelaksanaan Operasi pasar	orang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan operasi pasar	8500	-	-	-	8500	Terkait langsung	619.703.100	BAPPEDA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya pelatihan dan pembinaan industri kecil mikro	Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	225 orang	Pelaksanaan IKM	orang	Jumlah masyarakat yang melakukan pelaksanaan IKM		225	-	-	225	Terkait langsung	699.761.800	BAPPEDA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya pelatihan dan pembinaan industri kecil mikro	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	320 orang	Pelatihan Kewirausahaan, Vokasional, Packaging, Kripik Pisang	orang	Jumlah masyarakat yang melakukan pelatihan kewirausahaan, vokasional, packaging, keripik pisang	-	-	320	-	320	Terkait langsung	347.844.600	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM	
Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya sarana pameran produk bagi pelaku industri	Pelaku UMKM	Jumlah Unit usaha yang Produktif, bernilai Tambah, memiliki Aset Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	Workshop	orang	Jumlah masyarakat yang melakukan workshop	-	30	-	-	30	Terkait langsung	16.316.800	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Meningkatkan Pendapatan	Kurangnya keterampilan dan skil pelaku umkm	Pelaku UMKM	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemirtraan Usaha Mikro	100 Orang	Pelatihan Pembuatan Bakso	Orang	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pembuatan bakso	-	-	100	-	100	Terkait langsung	134.844.200	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih rendahnya angka APS dan RLS	Pelajar/Siswa Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan bus sekolah gratis	288 Orang	Belanja Operasional Pendukung pelaksanaan Pelayanan 4 unit Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Honorarium Driver dan Kondektur Bus)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 4 unit bus sekolah gratis bagi pelajar	288	-	-	-	288	Terkait langsung	56.400.000	BAPPEDA	Dinas Perhubungan
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masih rendahnya angka APS dan RLS	Pelajar/Siswa Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan bus sekolah gratis	288 Orang	Belanja Operasional Pendukung pelaksanaan Pelayanan 4 unit Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bus)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 4 unit bus sekolah gratis bagi pelajar	288	-	-	-	288	Terkait langsung	74.220.000	BAPPEDA	Dinas Perhubungan
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Desa.Batu Agung Kec. Merbau Mataram	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan tangki septik komunal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Desa.Talang Jawa Kec. Merbau Mataram	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan tangki septik komunal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Desa.Talang Way Sulan Kec. Way Sulan	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan tangki septik komunal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Mekarsari Kec. Way Sulan	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan tangki septik komunal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Pamulihan Kec. Way Sulan	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih ada keluarga yang tidak punya Tangki Septik	Kepala Keluarga	Skala Permukiman yang dibangun			tangki septik komunal											
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Permukiman yang tidak memiliki SPLAD	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan T angki Septik Komunal (5-10 KK) Desa Purwodadi Kec. Way Sulan	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan tangki septik komunal	-	-	10	-	10	Terkait langsung	250.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Permukiman yang tidak memiliki SPLAD	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman Desa.Batu Agung Kec. Merbau Mataram	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman	-	-	10	-	10	Terkait langsung	184.560.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Permukiman yang tidak memiliki SPLAD	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman Desa.Talang Jawa Kec. Merbau Mataram	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman	-	-	10	-	10	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Permukiman yang tidak memiliki SPLAD	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat Desa Sinar Rejeki Kec. Jati Agung	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman	-	-	10	-	10	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Permukiman yang tidak memiliki SPLAD	Kepala Keluarga	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	10 KK	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat Desa Marga Agung Kec. Jati Agung	KK	Jumlah orang yang mendapatkan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Pemukiman	-	-	10	-	10	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jembatan rusak di lokus Kemiskinan	Masyarakat	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 unit	Penggantian Lantai Jembatan Jl. Ruas Way Galih - Sukanegara Kec. Tanjung Bintang	unit	Jumlah lantai jembatan yang dibangun	-	-	1	-	1	Terkait langsung	1.000.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jembatan rusak di lokus Kemiskinan	Masyarakat	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 unit	Pembangunan Jembatan Dusun Banyumas Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo	unit	Jumlah lantai jembatan yang dibangun	-	-	1	-	1	Terkait langsung	1.300.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	450 m	Pelebaran Perkerasan Ruas Jalan Sp. Serdang - Way Galih (R. 167) Kecamatan Tanjung Bintang	m	Jumlah panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	-	-	450	-	450	Terkait langsung	1.101.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 m	Pemeliharaan Jalan Ruas Serdang - Jati Indah (R. 162) Kec. Tanjung Bintang	m	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	-	150	-	150	Terkait langsung	177.786.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	115 m	Pemeliharaan Jalan Ruas Sp. Serdang - Way Galih (R. 167) Kec. Tanjung Bintang	m	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	-	115	-	115	Terkait langsung	177.786.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 m	Pemeliharaan Jalan Ruas Natar - Negara Ratu Kec. Natar	m	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	-	150	-	150	Terkait langsung	182.230.650	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 m	Pemeliharaan Jalan Ruas Palembapang - Lubuk Jukung (R. 082) Kec. Kalianda	m	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	-	150	-	150	Terkait langsung	155.562.750	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	120 m	Pemeliharaan Jalan Ruas Bulok - Sp. Siring Jaha (R.073) Kec. Kalianda dan Kec. Sidomulyo	m	Jumlah panjang jalan yang dipelihara secara rutin	-	-	120	-	120	Terkait langsung	177.786.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	350 m	Peningkatan Jalan Asem Bumi Terang Desa Kali Asin Kec. Tanjung Bintang	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	350	-	350	Terkait langsung	500.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1300 m	Rekonstruksi Jalan Ruas Trimulyo - Budi Lestari (R.170) Kecamatan Tanjung Bintang	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	1300	-	1300	Terkait langsung	1.500.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1000 m	Peningkatan Jalan Ruas Sp. Pasar Suban - Mekar Jaya (Lanjutan) Kecamatan Merbau Mataram	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	1000	-	1000	Terkait langsung	1.000.000.000,00	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1300 m	Rekonstruksi / Pemeliharaan Berkala Merak Batin - Batas Bandar Lampung (R.205) Kecamatan Natar	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	1300	-	1300	Terkait langsung	1.500.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	300 m	Peningkatan jalan s/d hotmix Dusun IV Desa Jati Mulyo kec. Jati Agung	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	300	-	300	Terkait langsung	400.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	350 m	Peningkatan Jalan Permata Raya Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung (Lanjutan) Kecamatan Jati Agung	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	350	-	350	Terkait langsung	500.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	500 m	Peningkatan Jalan Airan 1 Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	500	-	500	Terkait langsung	700.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	200 m	Peningkatan Jalan Mawar Desa Way Hui Kec. Jati Agung (Lanjutan)	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	200	-	200	Terkait langsung	300.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1000 m	Rekonstruksi Jalan Ruas Sp. Babatan - Rejosari (R.091) Kecamatan Katibung	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	1000	-	1000	Terkait langsung	2.000.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	162 m	Peningkatan Jalan Usaha II Dusun Pati Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	162	-	162	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	162 m	Peningkatan Jalan Sunan Ampel Dusun Umbul Keong 2 Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	162	-	162	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	430 m	Rekonstruksi/Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Palembang - Lubuk Jukung (R.082) Kecamatan kalianda	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	430	-	430	Terkait langsung	650.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	675 m	Rekonstruksi/Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Lubuk Dalam - Way Urang (R.068) Kecamatan kalianda	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	675	-	675	Terkait langsung	1.500.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1400 m	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Ruas Sukamarga - Bulok (R 072) Kecamatan Kalianda	m	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi	-	-	1400	-	1400	Terkait langsung	11.190.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jembatan rusak di lokus Kemiskinan	Masyarakat	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 unit	Pembangunan Box Culver Ruas Jalan Tanjungan - Negla Sari Kec. Katibung	unit	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	-	-	1	-	1	Terkait langsung	185.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jembatan rusak di lokus Kemiskinan	Masyarakat	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 unit	Pembangunan Box Culver Perum Hartono Kel. Way Urang Kec. Kalianda	unit	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	-	-	1	-	1	Terkait langsung	200.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Jalan rusak di lokus kemiskinan	Masyarakat	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	440 m	Rehabilitasi Jalan Ruas Trans Tanjungan - Batu Liman (R. 128) Kecamatan Katibung	m	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	-	-	440	-	440	Terkait langsung	1.000.000.000	BAPPEDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.000 Dokumen	Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi kependudukan DI Desa (Meminimalisir Pengeluaran /Cost dalam mengurus dokumen Kependudukan ke Kabupaten)	dokumen	Jumlah dokumen Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi Kependudukan DI Desa	-	-	10.000	-	10000	Terkait langsung	391.361.600	BAPPEDA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**  
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**  
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masyarakat (yang sakit, lansia dan disabilitas) yang belum memiliki dokumen kependudukan	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	250 Dokumen	Pelayanan Yanduksatlantas (Pelayanan Adinistrasi Kependudukan bagi orang sakit, lansia dan disabilitas)	dokumen	Jumlah dokumen Pelayanan Yanduksatlantas	-	-	250	-	250	Terkait langsung	81.450.000	BAPPEDA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Masyarakat yang belum memiliki dokumen catatan sipil	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2500 Dokumen	Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi kependudukan DI Desa (Meminimalisir Pengeluaran /Cost dalam mengurus dokumen Akta Pencatatan Sipil	dokumen	Jumlah dokumen Pelayanan Keliling Jemput Bola (PAKDE) Pelayanan Administrasi Kependudukan DI Desa	-	-	2500	-	2500	Terkait langsung	84.269.750	BAPPEDA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Desa yang jauh dari tempat pelayanan Adminduk	Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150 Desa	Fasilitasi bagi Desa untuk siap melaksanakan Adminduk Di Desa	desa	Jumlah desa untuk siap melaksanakan adminduk di desa	-	-	150	-	150	Terkait langsung	125.675.000	BAPPEDA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Meminimalisir kesalahan dalam Penyusunan APBDes	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	256 desa	Fasilitasi Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta APBDEsa Perubahan (memaksimalkan penggunaan Anggaran Desa yang tepat sasaran, efektif dan efisien serta meminimalisir penyimpangan penggunaan Anggaran Desa).	desa	Jumlah desa yang divaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta APBDEsa Perubahan	-	-	256	-	256	Tidak Terkait langsung	312.000.000	BAPPEDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Meminimalisir kesalahan dalam Penyusunan APBDes	Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	256 desa	Fasilitasi dalam menyusun data base perangkat desa serta Informasi dokumen publik untuk masyarakat sehingga membantu menciptakan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Serta memiliki sistem managemen data perangkat desa dan	desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menyusun data base perangkat desa serta Informasi dokumen publik untuk masyarakat	-	-	256	-	256	Tidak Terkait langsung	31.890.000	BAPPEDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN**
**SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF**
**INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN**

					dokumen desa yang dapat diakses secara daring.												
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Meminimalisir kesalahan dalam Penyusunan APBDes	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	256 desa	Fasilitasi dalam menyusun Laporan Aset Desa serta membantu menciptakan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan Memungkinkan pemerintah desa memiliki sistem manajemen aset yang terpadu, terstandarisasi, dan dapat dipantau secara daring	desa	Jumlah desa yang menyusun Laporan Aset Desa serta membantu menciptakan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan Memungkinkan pemerintah desa memiliki sistem manajemen aset yang terpadu, terstandarisasi, dan dapat dipantau secara daring	-	-	256	-	256	Tidak Terkait langsung	61.986.900	BAPPEDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan di lampung Selatan	Perangkat Daerah Anggota TKPK	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	17 Perangkat Daerah & Stake Holder Terkait	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Perangkat Daerah & Stake Holder Terkait	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah	17	-	-	-	17	Tidak Terkait langsung	518.288.400	BAPPEDA	BAPPEDA	
Inovasi	Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan data kemiskinan yang tidak valid	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Aplikasi Cek bantuan Sosial	1 aplikasi	Aplikasi Sibangkodir	Aplikasi	Jumlah anggota tim Sibangkodir	1	1	1	1	1	Terkait langsung	12.000.000	BAPPEDA	BAPPEDA	
Inovasi	Kurangnya ketersediaan angkutan umum dan biaya transport anak sekolah	Siswa sekolah	Bus Sekolah	1 aplikasi	Aplikasi S-travis	Aplikasi	Bus Sekolah	4	4	4	4	4	Langsung	130.620.000	BAPPEDA	Dishub	

ASPEK	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan Masyarakat/stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana									
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana								
<b>RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN</b>																								
<b>SASARAN : PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF</b>																								
<b>INDIKATOR : TINGKAT KEMISKINAN</b>																								
Pengawasan	Perlunya dilakukan pengawasan internal terkait program pengentasan kemiskinan	Terwujudnya pengawasan terhadap sasaran/program pengentasan kemiskinan	Percentase Perangkat Daerah pengampu sasaran/program kemiskinan yang dilakukan pengawasan	25%	Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program meningkatkan akses pelayanan dasar	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	-	-	-	3	3	tidak	2.665.000,00		Inspektorat								
					Melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah pengampu sasaran/program Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Kali	Jumlah kegiatan pengawasan	-	-	-	1	1	tidak	62.100.000,00		Inspektorat								

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 2025

RENCANA AKSI RB PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT	TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI**
**SASARAN : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH**
**INDIKATOR : NILAI REALISASI INVESTASI**

Perencanaan dan Penganggaran	Peta potensi belum dilakukan kajian sesuai dengan karakteristik daerah	Kajian peta potensi investasi yang sesuai dengan karakteristik daerah	Jumlah dokumen terkait kajian peta potensi investasi Kabupaten Lampung Selatan	1	Melakukan pemilihan penyedia melalui e katalog	dokumen	Jumlah dokumen pengadaan	-	-	-	1	1	Terkait	-	DPMPPPTSP	Bidang Perizinan
Proses Bisnis dan SOP	SOP pelayanan surat izin praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis masih berbelit dan kurang efisien	Penyederhanaan SOP agar waktu pelayanan lebih singkat	Jumlah SOP baru yang disederhanakan dan digitalisasi	1	Review, pemangkasan alur, dan digitalisasi SOP perizinan	dokumen	SOP (dokumen)	-	-	-	1	1	Tidak	16.051.650	Bidang Perizinan	Bidang Perizinan
Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM pelayanan perizinan kurang menguasai OSS & regulasi terbaru	SDM kompeten, responsif, dan paham regulasi investasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan OSS & pelayanan prima	2	Pelatihan OSS, regulasi investasi, dan etika pelayanan	orang	Sertifikat pelatihan	0	2	0	0	2	Tidak	214.555.800	Bidang Pengawasan Penanaman Modal	Bidang Pengawasan Penanaman Modal
	Belum terdapat dokumen Gap Kompetensi pegawai	Tersedianya dokumen Gap Kompetensi pegawai pada DPMPPPTSP	Persentase pegawai yang dilakukan mapping kompetensi	100%	Menyusun dokumen Gap Kompetensi seluruh pegawai DPMPPPTSP	dokumen	Jumlah dokumen Gap Kompetensi seluruh pegawai DPMPPPTSP	-	-	-	1	1	Terkait	-	DPMPPPTSP	Bidang Perizinan
Pengawasan	Masih rendahnya penyampaian laporan LKPM oleh pelaku usaha	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan LKPM oleh pelaku usaha	persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan LKPM	60%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan pelaporan LKPM	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	-	75	75	70	220	Terkait	214.609.100	DPMPPPTSP	Bidang Perizinan
Teknologi Informasi	Layanan belum sepenuhnya dilakukan secara digitalisasi	Optimalisasi aplikasi pusat & aplikasi daerah	Jumlah layanan yang terdigitalisasi	30	Optimalisasi layanan perizinan secara digitalisasi	jumlah pelayanan	Layanan perizinan secara digitalisasi	-	-	-	30	30	Terkait	325.888.600	DPMPPPTSP	Bidang Perizinan
Inovasi	Proses penerbitan SIP manual memakan waktu lama (karena pengumpulan dokumen fisik, tata muka, dan verifikasi manual)	Mempercepat waktu penerbitan SIP, Memudahkan tenaga kesehatan untuk mengurus SIP tanpa harus datang ke kantor dinas, Meningkatkan transparansi & akuntabilitas dengan tracking status	Jumlah permohonan SIP yang diproses secara online	1	Pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan online	jumlah	aplikasi	-	-	-	1	1	Terkait	325.888.600	Bidang Perizinan	Bidang Perizinan

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT	TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI**
**SASARAN : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH**
**INDIKATOR : NILAI REALISASI INVESTASI**

		permohonan secara real-time														
Pengawasan	Belum optimalnya regulasi terkait iklim Investasi yang kondusif sesuai dengan tata ruang wilayah	Tersedianya fasilitasi terkait regulasi batas kecamatan sesuai dengan tata ruang wilayah	Jumlah permasalahan batas kecamatan yang telah di fasilitasi	3	Memfasilitasi permasalahan batas wiayah kecamatan	Dokumen	Jumlah dokumen fasilitasi	1	1	1	-	3	Terkait	1.575.000	Bagian Tapem	Bagian Tapem
Perencanaan dan Penganggaran	Belum adanya Surat Keputusan Kementerian dalam Negeri terkait Penegasan Batas Daerah Perdesaan di Kabupaten Lampung Selatan	Meregistrasi dan mengusulkan batas wilayah desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah ke Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri	Jumlah desa	222	Membuat peta poligon desa	Desa	Jumlah peta poligon desa yang selesai disusun	-	-	-	222	222	Terkait	35.862.000	Kabid Pemerintahan Desa	DPMD
					Mengusulkan batas wilayah desa yang telah diregistrasi oleh Badan Informasi Geospasial ke Kementerian Dalam Negeri bersama Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan	Desa	Jumlah desa yang diusulkan untuk dilakukan registrasi oleh Badan Informasi Geospasial	-	-	-	222	222	Terkait	35.862.000	Kabid Pemerintahan Desa	DPMD
					Mengusulkan batas wilayah desa yang telah diregistrasi oleh Badan Informasi Geospasial ke Kementerian Dalam Negeri bersama Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan	Desa	Jumlah desa yang telah diregistrasi oleh badan Informasi Geospasial yang diusulkan ke Kemendagri	-	-	-	222	222	Terkait	35.862.000	Kabid Pemerintahan Desa	DPMD
	Masih kurangnya akses jalan desa yang mendukung aktivitas jalan produksi ketahanan pangan	Perbaikan dan pembangunan akses jalan desa menuju jalan produksi ketahanan pangan	Jumlah ruas jalan desa yang dibangun untuk mendukung akses jalan	256	Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran	Desa	Jumlah ruas jalan yang telah di verifikasi dan evaluasi pada perencanaan	256	-	256	-	256	Terkait	80.869.000	DPMD	DPMD

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT	TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	Koordinator	Pelaksana

**RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI**

**SASARAN : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH**

**INDIKATOR : NILAI REALISASI INVESTASI**

			produksi ketahanan pangan		pembangunan jalan desa pada APBDesa		dan penganggaran pembangunan jalan desa								
Proses Bisnis dan SOP	Belum adanya SOP terkait proses verifikasi pada tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan jalan desa, jembatan dan pembangunan fisik lainnya	Membuat SOP	jumlah dokumen SOP	1	Membuat dokumen SOP terkait proses verifikasi pada tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan jalan desa, jembatan dan pembangunan fisik lainnya	dokumen	Jumlah dokumen SOP yang dibuat	-	-	-	1	1	Terkait	-	DPMD
Inovasi	Permasalahan Jaringan Internet masalah sarver berbasis windows 1. Aplikais sistem informasi Aparatur desa (SIAP Desa)	Apartur Desa	Jumlah Apartur Desa	256	Pelatihan Aplikasi SIAP Desa	Aparatur	Jumlah Pengguna	256	256	-	-	256	Terkait	36.540.000	DPMD
	2. Aplikasi Sistem Pengajuan operasional keuangan desa (SIMPOK Desa)	Kaur keuangan desa	Jumlah kaur desa	256	Pelatihan Aplikasi SIMPOK Desa	Orang	Jumlah Pengguna	256	256	-	-	256	Terkait	-	DPMD
Teknologi Informasi	Jaringan Internet	Apartur Desa	Jumlah Apartur Desa	256	Pembinaan Aparatur desa	Aparatur	Jumlah Pengguna	-	-	-	256	256	Terkait	-	DPMD

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana									
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana								
<b>RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI</b>																								
<b>SASARAN : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH</b>																								
<b>INDIKATOR : NILAI REALISASI INVESTASI</b>																								
Perencanaan dan Penganggaran	Belum adanya anggaran peningkatan kompetensi Tenaga Teknis dan penyediaan tenaga penilik	Melakukan penganggaran peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan pendataan bangunan gedung. Pengembangan SIMBG	Tersedianya anggaran peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik	1		Melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik	dokumen	Tersedianya dokumen perhitungan kebutuhan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik	-	-	-	1	1	terkait	- Dinas PUPR	Dinas PUPR								
						Melakukan penganggaran kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik	dokumen	Tersedianya DPA kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan penilik	-	-	-	1	1	terkait	- Dinas PUPR	Dinas PUPR								
Proses Bisnis dan SOP	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG : Proses perizinan teknis dan rekomendasi PUPR belum optimal (terlalu	Meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan teknis (rekomendasi bangunan, siteplan, Izin Mendirikan Bangunan).	Persentase layanan rekomendasi teknis yang diselesaikan secara digital sesuai waktu yang ditetapkan	100%		Melakukan evaluasi dan penyederhanaan SOP palayanan teknis (rekomendasi bangunan, siteplan, Izin Mendirikan Bangunan).	Dokumen	Jumlah SOP yang dievaluasi dan disederhanakan	1	1	1	1	1	terkait	- Dinas PUPR	Dinas PUPR								

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT	TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana								
							SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	Koordinator	Pelaksana							
<b>RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI</b>																						
<b>SASARAN : MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH</b>																						
<b>INDIKATOR : NILAI REALISASI INVESTASI</b>																						
		lama dan belum terintegrasi).																				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang Perizinan OSS	Meningkatnya pemahaman pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan melalui OSS	Pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi	240 pelaku usaha	Sosialisasi tentang perizinan OSS	Kegiatan	Jumlah sosialisasi tentang perizinan OSS	-	2	2	-	4	Terkait	18.000.000	Dinas Koperasi UKM	Bidang UKM						
Pengawasan	Perlunya dilakukan pengawasan internal terkait program pelayanan perizinan	Terwujudnya pengawasan terhadap sasaran/program pelayanan perizinan	Jumlah pengawasan atas program pelayanan perizinan	1 Keg	Melakukan reviu pelayanan perizinan berdasarkan resiko tertinggi pada DPMPPPTSP	Keg	Jumlah kegiatan reviu	-	-	-	1	1	Terkait	1.200.000	Inspektorat	Inspektorat						

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 2025

**RENCA NA AKSI RB MENDORONG HILIRISASI  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI</b>																	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap standar keamanan pangan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap standar mutu dan keamanan pangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	25 Pelaku Usaha	Pelaksanaan pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	Kegiatan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	-	-	25 Pelaku Usaha	-	25 Pelaku Usaha	Terkait	10000000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bidang Industri	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih kurangnya pemahaman pelaku IKM/UMKM untuk mendapatkan perizinan melalui OSS	Meningkatnya pemahaman pelaku IKM/UMKM yang mengikuti sosialisasi dan mendapatkan nilai pos tes 70	Jumlah pelaku IKM/UMKM yang mengikuti sosialisasi dan mendapatkan perizinan OSS	240	Sosialisasi tentang perizinan OSS	Kegiatan	Jumlah sosialisasi tentang perizinan OSS	-	2	2	-	4	Terkait	18.000.000	Dinas Koperasi UKM	Bidang UKM	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha (petani/KWT) dalam pengolahan hasil tanaman perkebunan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil perkebunan	100%	Pelatihan pembuatan gula kelapa menjadi gula semut dan pembuatan nata de coco	Orang	Jumlah peserta pelatihan	-	-	50	-	50	Terkait	11.707.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
	Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha (petani/KWT) dalam pengolahan hasil hortikultura	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil hortikultura	100%	Pelatihan pengolahan daun kelor	Orang	Jumlah peserta pelatihan	-	-	25	-	25	Terkait	4.846.800	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Inovasi	Program Modernisasi Alsin Tanaman Pangan (Pro Mantap)	Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian komoditi terkait inflasi	Tersedianya alat pertanian modern	100%	Pembagian alat pemipil jagung (corn sheller mobile dan corn sheller)	Unit	Jumlah alat	-	-	6	-	6	Terkait	255.750.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan Jumlah Anggaran dalam Pengelolaan Sampah	Rencana Kerja yang Efektif	Presentase Pencapaian Kinerja	100%	Menyusun rencana kerja yang efektif, efisien, dan tetap mencapai target program prioritas	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	-	1	-	2	Terkait		DLH	DLH	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI																	
Proses Bisnis dan SOP	Belum termonitoringnya Pengelolaan sampah lintas sektoral	Meningkatkan Pengelolaan sampah dengan Instansi/Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu	Laporan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	Pemberian Bantuan Peralatan Pengelolaan Sampah	Dokumen	Jumlah Bantuan yang diberikan	-	-	5	-	5	Terkait		DLH	DLH	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing.	Meningkatnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing.	Jumlah masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ada di Lampung Selatan	4 Kelompok Masyarakat	Sosialisasi tentang kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing	Kegiatan	Jumlah sosialisasi tentang kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan memilah sampah dari rumah tangga masing-masing	-	-	2	2	4	Terkait	85.738.500	DLH	DLH	
Pengawasan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Belum Terjadwal dan Keterbatasan data dan informasi	Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, Kelompok Masyarakat dan TPS 3R	Laporan Monitoring dan Evaluasi	17 Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, Kelompok Masyarakat dan TPS 3R	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sampah	4	4	4	5	17	Terkait		- DLH	DLH	
Teknologi Informasi	Belum Optimalnya Penggunaan Media Sosial	Memanfaatkan Media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi Publik	Meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	17 Kecamatan	Optimalisasi penggunaan media sosial dan website resmi	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	4	4	5	17	Terkait		- DLH	DLH	
Inovasi	Belum Optimalnya Pelaksanaan Inovasi 1. Bersama Sehati 2. Budidaya Magot di TPA 3. Satu Desa Satu Bank Sampah	Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	Berkurangnya Sampah yang masuk ke TPA	2 TPA	Meningkatkan efektivitas pengurangan sampah dari sumbernya Melalui penerapan konsep reduce, reuse, recycle (3R) dan pembiasaan pemilahan sampah di rumah tangga, sekolah, dan perkantoran	Kegiatan	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Inovasi	2	2	2	2	2	Terkait		- DLH	DLH	
Proses Bisnis dan SOP	Masih rendahnya informasi terkait kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi di Bidang Barista	Kemudahan akses untuk memperoleh informasi pelatihan Barista	Jumlah Pendaftar	30	Melakukan proses seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara	orang	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi	-	-	30	-	30	Terkait		- Disnakertrans	Disnakertrans	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI																	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih rendahnya kompetensi di bidang pengolahan komoditas kopi	Meningkatnya kompetensi di bidang pengolahan komoditas kopi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi pengolahan komoditas kopi	30	Melakukan pelatihan barista	orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	-	-	30	-	30	Terkait	-	Disnakertrans	Disnakertrans	
Pengawasan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Belum Terjadwal dan Keterbatasan informasi	Pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan barista	Pencari kerja yang telah bekerja dan yang berwirausaha mandiri	30	Monitoring terhadap pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan barista	orang	Jumlah pencari kerja yang bekerja dan berwirausaha mandiri	-	-	30	-	30	Terkait	-	Disnakertrans	Disnakertrans	
Teknologi Informasi	Belum Optimalnya Penggunaan Media Sosial	Memanfaatkan Media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi Publik	Informasi tentang pelatihan kompetensi di bidang barista	17	Optimalisasi penggunaan media sosial dan website resmi	Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	17	-	17	Terkait	-	Disnakertrans	Disnakertrans	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum Berkembangnya produk pariwisata berbasis potensi lokal	Meningkatnya Daya Tarik destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100	Memberikan pelatihan keterampilan pariwisata kepada masyarakat lokal, seperti pemandu wisata dan penjaga pantai.	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	2	-	2	Terkait	163438400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100	Memberikan pelatihan keterampilan pariwisata kepada masyarakat lokal, seperti kerajinan tangan, dan kuliner khas daerah.	Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	100	-	100	Terkait	87410300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Pengawasan	Kurangnya Pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100	Melakukan evaluasi dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan Kegiatan secara transparan dan akuntabel.	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	1	-	1	Terkait	58979000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Teknologi Informasi	Belum dimanfaatkannya platform digital dan media sosial	Meningkatnya Jangkauan pemasaran Pariwisata	Jumlah Peningkatan Media Promosi Pemasaran Pariwisata	2	Manfaatkan teknologi informasi berbasis media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata dan produk lokal.	Promosi	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	2	-	#VALUE!	Terkait	16456000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Proses Bisnis dan SOP	Masih terbatasnya alat pengolahan pangan lokal	KWT, UMKM	Jumlah kelompok penerima hibah alat pengolahan pangan lokal	10 kelompok	pemberian bantuan atau hibah alat pengolahan pangan lokal	kelompok	Jumlah kelompok penerima hibah alat pengolahan pangan lokal	-	-	10	-	10	Terkait	125.589.000	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Panganekar	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI																
			pengolahan pangan lokal													agaman Pangan
Sumber Daya Manusia (SDM)	terbatasnya pengetahuan SDM tentang pengolahan pangan lokal	KWT, UMKM	Jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal	2 kali	pelatihan pengolahan pangan lokal	kali	jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal	-	1	1	-	2	Terkait	13.601.700	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Pengane kar agaman Pangan
Pengawasan	rendahnya monitoring/pelaporan penggunaan hibah alat pengolahan pangan lokal	KWT, UMKM	Jumlah monitoring dan evaluasi (monev) hibah alat pengolahan pangan local	10 kali	kunjungan monev pada tahun n+1	kali	Jumlah monitoring dan evaluasi (monev) hibah alat pengolahan pangan lokal	-	-	10	-	10	Terkait		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Pengane kar agaman Pangan
Teknologi Informasi	terbatasnya penggunaan sosial media dan marketplace untuk pemasaran produk	KWT, UMKM	Jumlah pelatihan pemasaran digital	1 kali	pelatihan pemasaran digital	kali	jumlah pelatihan pemasaran digital	-	-	1	-	1	Terkait	5.886.800	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Pengane kar agaman Pangan
Inovasi	Masih terbatasnya alat pengolahan pangan lokal untuk inovasi lahan pangkal	KWT, UMKM	Jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal	2 kali	pelatihan pengolahan pangan	kali	jumlah pelatihan pengolahan pangan lokal	-	1	1	-	2	Terkait	13.601.700	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Pengane kar agaman Pangan
Proses Bisnis dan SOP	Tingginya harga pakan ikan	Meningkatnya pokdakan yang membuat pakan ikan mandiri	Jumlah sarana Produksi Pakan Mandiri magoot	1 Unit	Melakukan pemberian hibah peralatan budidaya magoot	Unit	Jumlah Peralatan Budidaya magoot yang tersedia	-	-	1	-	1	Terkait	19.825.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Kemasan produk pengolahan yang dihasilkan belum sesuai dengan permintaan pasar	Meningkatnya pengolah ikan yang mengemas produk olahan sesuai permintaan pasar	Jumlah sarana packaging produk perikanan	10 Paket	Melakukan pemberian hibah bantuan packaging berupa vacum sealer untuk pengolah perikanan	Paket	Jumlah peralatan packaging produk perikanan yang tersedia	-	10	-	-	10	Terkait	22.670.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Kurangnya sarana pemasar ikan dalam penerapan sistem rantai dingin	Meningkatnya pelaku pemasar ikan dalam penerapan sistem rantai dingin	Jumlah sarana pemasar ikan dalam penerapan sistem rantai dingin	60 Paket	Melakukan pemberian hibah bantuan cool box dan sepatu boot untuk pemasar ikan	Paket	Jumlah sarana cool box dan sepatu boot untuk pemasar perikanan	-	60	-	-	60	Terkait	91.704.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan belum sesuai tuntutan pasar	Meningkatnya mutu pengolahan dan kapasitas pelaku usaha	Jumlah unit usaha yang meningkat mutu produksinya dan kapasitasnya	30 Unit Usaha	Melakukan Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha Pengolahan	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan	-	-	30	-	30	Terkait	12.438.400	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Kurangnya pengetahuan	Meningkatnya pengetahuan	Peningkatan Jumlah	30 Orang	Melakukan pelatihan pengolahan menu	Orang	Jumlah keluarga beresiko stunting	-	-	30	-	30	Terkait	8.079.500	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI</b>																	
	masyarakat atas pentingnya gizi dari ikan	dan pemahaman keluarga beresiko stunting untuk memenuhi gizi keluarganya	keluarga beresiko stunting yang memahami pengolahan menu berbahan dasar ikan		berbahan ikan untuk keluarga beresiko stunting		yang mengikuti pelatihan pengolahan menu berbahan ikan										
	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dalam hilirisasi rantai dingin	Meningkatnya pemahaman Pelaku usaha pengolahan dalam hilirisasi perikanan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memahami hilirisasi sistem rantai dingin produk perikanan	30 Orang	Melakukan Sosialisasi Rantai Dingin dalam penanganan pengolahan bahan baku ikan	Orang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi hilirisasi rantai dingin	-	-	30	-	30	Terkait	8.079.500	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
Teknologi Informasi	Kurangnya pengetahuan bagi para Kader Gemarikan untuk mensosialisasikan Gemarikan kepada masyarakat	Meningkatkan pemahaman bagi kader gemarikan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Peningkatan jumlah kader gemarikan untuk memahami Gemarikan	200 Orang	Melakukan Bimbingan Teknis kepada Kader Gemarikan	Orang	Jumlah Kader Gemarikan yang mengikuti BIImtek	-	200	-	-	200	Terkait	68.323.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
Inovasi	Mangrove tidak termanfaatkan dan dianggap menjadi limbah kawasan pesisir	Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pelestarian lingkungan mangrove	Peningkatan jumlah kelompok yang memanfaatkan mangrove	1 KUB	Melakukan Pembinaan Produksi dan pemberian hibah packaging untuk batik mangrove kepada kelompok masyarakat	Kelompok	Jumlah Kelompok yang menerima bantuan packaging untuk batik mangrove	-	-	1	-	1	Terkait	8.100.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan belum terkoordinir dengan baik antar Perangkat Daerah sektor Ketahanan Pangan dalam penyusunan perencanaan	Meningkatnya koordinasi antar Perangkat Daerah sektor Ketahanan Pangan dalam penyusunan perencanaan	Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah sektor Ketahanan Pangan dalam penyusunan perencanaan	4 PD	Melaksanakan rapat kordinasi kepada OPD yang melakukan kegiatan hilirisasi (Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM)	Laporan	Terlaksananya rapat kordinasi terkait hilirisasi OPD pengampu	1	1	1	1	4	Terkait	47.082.700	Bappeda Lampung Selatan	Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM)	
Perencanaan dan Penganggaran	Inovasi ketahanan pangan belum optimal	Terintegrasiya inovasi	Jumlah inovasi ketahanan	Minimal 2 inovasi	Fasilitasi pertemuan perencanaan	Inovasi	Jumlah inovasi ketahanan pangan	9	-	-	-	9	Terkait	5.000.000		Dinas Ketahanan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI																	
	terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah	ketahanan pangan dalam rencana kerja perangkat daerah	pangan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	ketahanan pangan terakomodasi dalam RKP/R enja OPD teknis	bersama OPD teknis untuk integrasi inovasi ketahanan pangan ke dalam RKP/R enja OPD teknis		yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan							Terkait	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					Penyusunan daftar inovasi ketahanan pangan hasil riset BRIDA untuk mendukung program hilirisasi												
Proses Bisnis dan SOP	Belum optimalnya mekanisme kerja sama antar perangkat daerah dalam mendorong hilirisasi inovasi ketahanan pangan	Terbentuknya pedoman kerja sama antara BRIDA dan OPD teknis	Dokumen pedoman atau SOP kerja sama tersedia dan diterapkan (Komitmen Kinerja Inovasi)	1 pedoma n kerja sama BRIDA-OPD teknis ditetapkan	Penyusunan dan penetapan pedoman/SOP kerja sama hilirisasi inovasi ketahanan pangan antar OPD	Dokumen	Dokumen pedoman atau SOP kerja sama tersedia dan diterapkan (Komitmen Kinerja Inovasi)	1	-	-	-	1	Terkait	3.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					Koordinasi lintas OPD untuk implementasi pedoman kerja sama tersebut									Terkait			
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kapasitas ASN dalam pengelolaan dan hilirisasi inovasi ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	Peningkatan kompetensi teknis terkait hilirisasi inovasi	Jumlah pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas inovasi daerah	1 kali pelatihan/n/bimtek peningkatan kapasitas inovasi daerah	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas ASN terkait pengelolaan dan hilirisasi inovasi ketahanan pangan	Pelatihan	Jumlah pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas inovasi daerah	1	-	-	-	1	Terkait	10.235.400	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					Fasilitasi kolaborasi pengetahuan dalam pemanfaatan inovasi									Terkait			
Pengawasan	Belum optimal sistem pemantauan terhadap pemanfaatan inovasi ketahanan pangan hasil riset BRIDA	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi inovasi ketahanan pangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi inovasi pangan per tahun	1 laporan monev hilirisasi inovasi pangan per tahun	Melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan hasil inovasi ketahanan pangan oleh OPD teknis atau pelaku usaha	Laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi inovasi pangan	-	-	-	1	1	Terkait	3.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi ketahanan pangan									Terkait			

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI																	
Teknologi Informasi	Data dan informasi hasil inovasi ketahanan pangan belum terdokumentasi dan terpublikasi secara sistematis	Tersedianya sistem informasi inovasi ketahanan pangan daerah	Jumlah inovasi ketahanan pangan yang dipublikasikan secara digital	9 inovasi ketahanan pangan terdokumentasi dan dipublikasikan	Pengelolaan dan pembaruan data hasil riset dan inovasi ketahanan pangan daerah	Inovasi	Jumlah inovasi ketahanan pangan yang dipublikasikan secara digital	9	-	-	-	9	Terkait	3.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
					Publikasi hasil inovasi ketahanan pangan melalui portal atau media informasi BRIDA												
Inovasi	Hasil riset BRIDA belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah dan pelaku usaha	Meningkatnya pemanfaatan hasil inovasi BRIDA untuk mendukung hilirisasi ketahanan pangan	Jumlah inovasi BRIDA yang dimanfaatkan oleh OPD teknis/pelaku usaha	Minimal 2 inovasi BRIDA dimanfaatkan oleh OPD teknis/pelaku usaha	Identifikasi inovasi ketahanan pangan hasil riset BRIDA yang siap diterapkan	Inovasi	Jumlah inovasi BRIDA yang dimanfaatkan oleh OPD teknis/pelaku usaha	-	-	-	9	9	Terkait	3.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
					Fasilitasi pemanfaatan inovasi BRIDA oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta pelaku usaha daerah												
Pengawasan	Perlunya dilakukan pengawasan internal terkait hilirisasi produk	Terwujudnya pengawasan terhadap sasaran/program hilirisasi produk	Jumlah pengawasan atas hilirisasi produk	1 Keg	Melakukan audit kinerja tematik pembangunan kepariwisataan	Keg	Jumlah kegiatan pengawasan	-	-	-	1	1	Terkait	10.000.000	Inspektorat	Inspektorat	
Perencanaan dan Penganggaran	Anggaran sektor peternakan seringkali terbatas	Tersusunnya usulan program prioritas peternakan yang berbasis data dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan local	tersedia Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1 dokumen	Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang memuat program ketahanan pangan peternakan	dokumen	jumlah Dokumen rencana kerja	-	-	-	1	1	Terkait	Rp4.145.250,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Proses Bisnis dan SOP	Pemanfaatan proses bisnis & SOP belum digunakan dengan optimal	Proses bisnis dan SOP digunakan sebagai dasar manajemen kinerja	Dokumen perencanaan mengacu pada proses bisnis RB Tematik	1	Integrasi proses bisnis & SOP ke evaluasi Renja	dokumen	dokumen evaluasi renja	-	-	-	1	1	Terkait	Rp13.177.750,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGE T	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	T W I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDORONG HILIRISASI</b>																	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Minimnya pelatihan tematik ketahanan pangan bagi masyarakat	Meningkatnya kompetensi teknis dan tematik SDM peternakan	Jumlah SDM mengikuti pelatihan	6	Pelatihan peningkatan kompetensi: IB, vaksinasi, pakan, pelayanan kesehatan hewan, data populasi, budidaya ternak	Pelatihan	Jumlah Pelatihan	-	2	2	2	6	Terkait	80.267.600,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Pengawasan	Pengetahuan Dasar Produk Hewan Rendah	masyarakat	terlaksananya sosialisasi terkait produk hewan	1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan melalui inovasi mister wayang	Laporan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp56.193.100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Teknologi Informasi	Pendataan populasi ternak masih manual dan tidak real time	Digitalisasi pendataan ternak secara berkala dan akurat	jumlah data populasi dan produksi ternak	4	Pengembangan sistem informasi populasi ternak	laporan	Laporan populasi dan produksi ternak	1	1	1	1	4	Terkait	38000000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Inovasi	kurangnya pemahaman terkait produk hewan	masyarakat	terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan terkait produk hewan	1	Pengawasan Produk Hewan melalui inovasi mister wayang	dokumen	jumlah Pelayanan	-	-	-	1	1	Terkait	321.070.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
 TANGGAL : 2025

RENCANA AKSI RB MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL																	
Perencanaan dan Penganggaran	Kondisi rawan pangan dapat terjadi sewaktu waktu	Masyarakat lampung selatan yang mengalami rawan pangan	Jumlah beras CPPD yang dimiliki oleh Pemda	117 ton	Proses pengadaan beras untuk penambahan CPPD	1	Jumlah Dokumen pengadaan cadangan pangan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	Terkait Langsung		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				23,05 ton	Penitipan beras CPPD hasil pengadaan ke gudang Bulog	ton	Penambahan jumlah beras CPPD yang tersimpan di gudang Bulog	-	-	-	23,05 ton	23,05	Terkait Langsung	319.820.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Proses Bisnis dan SOP	Kelembagaan distribusi pangan belum terbina dan terkelola dengan baik	Kios pangan di Kab. Lampung Selatan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina oleh DKP	1 kali pelatihan	Pelatihan kelembagaan distribusi pangan	kali	Jumlah Pelatihan kelembagaan distribusi pangan	-	1 kali	-	-	1 kali	Terkait Langsung	21.120.000	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum adanya verifikasi terkait kios pangan yang dibina Pemda Lampung Selatan	Kios pangan di Kab. Lampung Selatan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina oleh DKP	20 kios pangan	Verifikasi Kios Pangan	kios pangan	Jumlah Verifikasi Kios Pangan	5	5	5	5	20 unit	Terkait Langsung		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Pengawasan	Terbatasnya pengetahuan pemilik kios pangan terkait kelembagaan distribusi pangan	Kios pangan di Kab. Lampung Selatan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina oleh DKP	1 kali pelatihan	Pelatihan kelembagaan distribusi pangan	kali	Jumlah Pelatihan kelembagaan distribusi pangan	-	1 kali	-	-	1 kali	Terkait Langsung		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Teknologi Informasi	terbatasnya teknologi informasi yang digunakan oleh pemilik kios pangan	Kios pangan di Kab. Lampung Selatan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina oleh DKP	1 kali pelatihan	Pelatihan kelembagaan distribusi pangan	kali	Tersusunnya aplikasi/dashboard pengadaan & stok cadangan pangan.	-	1 kali	-	-	1 kali	Terkait Langsung		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Inovasi	Minim inovasi kerja sama dengan pelaku usaha pangan lokal untuk stabilisasi pasokan pada kegiatan pengadaan.	Terwujudnya model pengadaan cadangan pangan yang inovatif, transparan, dan berbasis data.	Jumlah inovasi/teknologi yang diimplementasikan pada proses pengadaan.	1 dokumen	Menyusun SOP Pengadaan Cadangan Pangan Berbasis Digital	kios pangan	Tersusunnya SOP pengadaan inovatif yang terstandar.	-	-	-	1 dokumen		Terkait Langsung		Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
Proses Bisnis dan SOP	Belum optimalnya produksi padi	Meningkatnya produksi padi	Produksi padi	338.238 Ton	Peningkatan Indeks Pertanaman	Ha	Luas lahan	-	-	40	-	40	Terkait	107.380.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Rendahnya produksi perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	Produksi perkebunan	48.121 Ton	Pelatihan Budidaya tanaman perkebunan	orang	Jumlah peserta pelatihan	-	75	-	-	75	Terkait	17.560.500	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pelatihan pengendalian OPT perkebunan	orang	Jumlah peserta pelatihan	50	-	-	-	50	Terkait	15.629.500	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Inovasi	Petani belum memahami penggunaan tenaga surya dalam budidaya padi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunaan tenaga surya	Produksi padi	338.238 Ton	Pelatihan penggunaan alsintan	orang	Jumlah peserta pelatihan	-	-	50	-	50	Terkait	7.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL																	
Perencanaan dan Penganggaran	Minimnya Perencanaan Berbasis Data lokal	memiliki sistem pendataan ternak yang akurat dan terintegrasi	tersedianya Dashboard data ternak aktif	Data populasi ternak ter-update per Triwulan di 17 kecamatan	Pemetaan populasi dan produksi ternak di kecamatan	dokumen	jumlah dokumen data petenakan	1	1	1	1	4	Terkait	Rp4.145.250,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Anggaran sektor peternakan seringkali terbatas	Tersusunnya usulan program prioritas peternakan yang berbasis data dan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan lokal	tersedia Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1 dokumen	Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang memuat program ketahanan pangan peternakan	dokumen	jumlah Dokumen rencana kerja	-	-	-	1	1	Terkait	Rp4.145.250,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Belum Optimalnya Pertumbuhan Populasi Ternak	Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Ternak yang diberikan	2840	Program peningkatan populasi melalui bantuan ternak	ekor										Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				1500	1. Pengadaan Ayam Petelur	ekor	Jumlah Ternak yang di adakan	-	-	-	1.500	1.500	Terkait	Rp257.625.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				1100	2. Pengadaan Kambing Rambon	ekor	Jumlah Ternak yang di adakan	-	-	-	1.100	1.100	Terkait	Rp246.400.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				60	3. Pengadaan Sapi PO Betina	ekor	Jumlah Ternak yang di adakan	-	-	-	60	60	Terkait	Rp750.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				180	4. Pengadaan Itik	ekor	Jumlah Ternak yang di adakan	-	-	-	180	180	Terkait	Rp30.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				2660	Pemanfaatan teknologi IB (inseminasi buatan)	dosis	Jumlah Sapi betina yang di IB	665	665	665	665	2.660		75.750.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				2	Jalan produksi peternakan	unit	Jumlah Jalan Yang di adakan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp400.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	keterbatasan fasilitas Peralatan dan teknologi pendukung peternakan	Tersedianya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana peternakan strategis secara optimal dan berkelanjutan.	Jumlah Prasarana Peternakan yang diberikan	10	Chopper (mesin Pencacah Rumput)	unit	Jumlah Mesin Yang di adakan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp493.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				4	sumur Bor	unit	Jumlah Sumur bor Yang di adakan	-	-	-	1	1	Terkait	Rp600.000.000,00	Dinas Peternakan dan	Dinas Peternakan dan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
																Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan
Proses Bisnis dan SOP	Pemanfaatan proses bisnis & SOP belum digunakan dengan optimal	Proses bisnis dan SOP digunakan sebagai dasar manajemen kinerja	Dokumen perencanaan mengacu pada proses bisnis RB Tematik	1	Integrasi proses bisnis & SOP ke evaluasi Renja	dokumen	dokumen evaluasi renja	-	-	-	1	1	Terkait	Rp13.177.750,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Minimnya pelatihan tematik ketahanan pangan bagi masyarakat	Meningkatnya kompetensi teknis dan tematik SDM peternakan	Jumlah SDM mengikuti pelatihan	6	Pelatihan peningkatan kompetensi: IB, vaksinasi, pakan, pelayanan kesehatan hewan, data populasi, budidaya ternak	Pelatihan	Jumlah Pelatihan	-	2	2	2	6	Terkait	80.267.600,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Pengawasan	Pengawasan pelaksanaan program belum sistematis dan menyeluruh	Terlaksananya pengawasan rutin	Laporan hasil pengawasan tersedia	4	Pelaksanaan pengawasan berkala	Laporan	Laporan populasi dan produksi ternak	1	1	1	1	4	Terkait	10.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				4	pelaporan data populasi dan produksi ternak ke aplikasi Sippentol	Laporan	Laporan populasi dan produksi ternak	1	1	1	1	4	Terkait		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Teknologi Informasi	Pendataan populasi ternak masih manual dan tidak real time	Digitalisasi pendataan ternak secara berkala dan akurat	jumlah data populasi dan produksi ternak	4	Pengembangan sistem informasi populasi ternak	laporan	Laporan populasi dan produksi ternak	1	1	1	1	4	Terkait	38000000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				4	Pelaporan populasi berbasis kecamatan	laporan	Laporan populasi dan produksi ternak	1	1	1	1	4	Terkait		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Inovasi	Ketergantungan tinggi pada pakan komersial, biaya produksi meningkat	Peningkatan kemandirian peternak dalam penyediaan pakan lokal	kelompok ternak menerapkan inovasi pakan	2 kelompok	Inovasi Bela Bapak (belajar dan latihan Pakan)	latihan	pelatihan pakam	1	1	1	1	4	Terkait	83.450.050,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Layanan kesehatan hewan belum merata dan respons lambat	Peningkatan akses dan kecepatan layanan kesehatan hewan	permintaan layanan tertangani cepat	80%	inovasi mister wayang (mobil sahabat ternak dan hewan kesayangan)	pelayanan	pelayanan kesehatan hewan	100%	100%	100%	100%	4	Terkait	321.070.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
					inovasi Trio Instan (Transfer Embrio, Inseminasi Buatan dan penanganan Kebuntingan)	pelayanan	pelayanan Inseminasi buatan adn transfer embrio	100%	100%	100%	100%	4	Terkait	75.750.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																
Proses Bisnis dan SOP	Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	Meningkatnya masyarakat yang mandiri untuk ketahanan pangan	Jumlah Masyarakat miskin yang diberi bantuan dalam meningkatkan konsumsi ikan	30 Orang	Melakukan pemberian hibah budikdamber untuk masyarakat kategori miskin	Paket	Jumlah masyarakat kategori miskin yang mendapat bantuan hibah budikdamber	-	-	30	-	30	Terkait	30.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	Meningkatnya masyarakat yang mandiri untuk ketahanan pangan	Jumlah masyarakat yang diberi bantuan untuk meningkatkan konsumsi ikan	10 Orang	Melakukan pemberian bantuan paket budidaya kolam terpal untuk masyarakat miskin	Paket	Jumlah Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan paket budidaya kolam terpal	-	-	10	-	10	Terkait	30.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan yang masih rendah sehingga masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi	Meningkatnya angka konsumsi ikan pada keluarga beresiko stunting untuk pemenuhan gizi keluarga	Jumlah keluarga beresiko stunting yang mendapatkan bantuan	25 Keluarga	Melakukan pemberian hibah budikdamber untuk keluarga beresiko stunting	Paket	Jumlah keluarga beresiko stunting yang mendapatkan bantuan budikdamber stunting	-	-	25	-	25	Terkait	25.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya pemahaman masyarakat kategori miskin dalam bidang perikanan untuk ketahanan pangan keluarga	Meningkatnya pemahaman masyarakat miskin akan budidaya ikan untuk ketahanan pangan keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pemahaman budidaya ikan secara sederhana	30 Orang	Melakukan Pelatihan Budikdamber untuk masyarakat miskin	Peserta	Jumlah peserta masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan budikdamber	-	-	30	-	30	Terkait	9.040.800,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Produksi udang menurun akibat penyakit	Meningkatnya pemahaman pembudidaya atas hama dan penyakit dilingkungan tambak	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pelatihan hama dan penyakit udang pada pembudidaya udang	20 Orang	Melakukan pelatihan hama dan penyakit udang pada pembudidaya udang	Peserta	Jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan Hama Penyakit Ikan/Udang	-	20	-	-	20	Terkait	7.503.030,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Rendahnya Produksi Perikanan tangkap	Meningkatnya pemahaman nelayan untuk peningkatan ketahanan pangan pada sektor perikanan	Jumlah Nelayan yang mendapatkan sosialisasi pengembangan kapasitas nelayan	20 Orang	Melakukan sosialisasi fasilitasi pengembangan kapasitas nelayan	Peserta	Jumlah Nelayan yang mengikuti sosialisasi pengembangan kapasitas	-	20	-	-	20	Terkait	7.451.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Inovasi	Keterbatasan modal dan kondisi peralatan yang kurang memadai	Meningkatkan masyarakat untuk peningkatan produksi udang sehingga meningkatkan ketahanan pangan	Jumlah Kelompok yang diberi bantuan untuk menunjang budidaya air payau	2 Kelompok	Melakukan pemberian hibah sarana dan prasarana budidaya air payau	Paket	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau	-	-	-	2	2	Terkait	110.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Proses Bisnis dan SOP	Masih adanya balita gizi kurang (wasting) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka balita gizi kurang (wasting) di Kabupaten Lampung Selatan	Balita gizi kurang (wasting) menerima PMT lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada balita gizi kurang (wasting)	Orang	Jumlah balita wasting	-	50%	-	50%	100%	Terkait	4.081.308.000	KUPT Puskesmas	Puskesmas

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
	Masih adanya balita stunting di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka balita stunting di Kabupaten Lampung Selatan	Balita Stunting menerima PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)	100%	Melaksanakan pemberian PKMK kepada balita stunting yang sudah dirujuk dan direkomendasikan oleh DSA	Orang	Jumlah balita stunting dirujuk DSA	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	50.000.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas	
	Masih adanya Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan)	Menurunnya angka Ibu Hamil KEK di Kabupaten Lampung Selatan	Ibu Hamil KEK menerima PMT Lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada Ibu Hamil KEK	Orang	Jumlah Ibu Hamil KEK	-	50%	-	50%	100%	Terkait	3.281.760.000	KUPT Puskesmas	Puskesmas	
Perencanaan dan Penganggaran	Kedalaman air tanah tidak sesuai rencana, sehingga sumur gali atau bor tidak bisa menghasilkan debit yang mencukupi	Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	7	Identifikasi lokasi dan survei awal Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	titik	Jaringan irigasi air tanah (sumur bor)	-	-	7	-	7	terkait	1.307.527.979,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Proses Bisnis dan SOP	Optimalnya pemanfaatan dan keberlanjutan jaringan irigasi air tanah untuk mendukung produktivitas pertanian.	Tersedianya alokasi anggaran dan program prioritas pembangunan jaringan irigasi air tanah yang tepat sasaran.	Persentase program irigasi air tanah yang masuk dalam prioritas tahunan	7	Pelaksanaan proses lelang/kontrak pekerjaan fisik pembangunan jaringan irigasi air tanah (sumur bor)	titik	Jaringan irigasi air tanah (sumur bor)	-	-	7	-	7	terkait				
Pengawasan	Kurangnya tenaga pengawas bersertifikat hidrogeologi atau irigasi air tanah	Tersedianya sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi	Persentase proyek yang dimonitor melalui dashboard digital pengawasan	100	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan	%	Dokumen Pengawasan Jaringan Air Tanah	-	-	-	100	100	terkait				
Teknologi Informasi	Belum ada sistem informasi manajemen irigasi (SIM Irigasi Air Tanah) yang memantau operasi, debit air, dan kondisi infrastruktur.	Tersedianya sistem informasi manajemen irigasi air tanah untuk memantau operasi dan kondisi jaringan secara berkelanjutan.	Persentase jaringan irigasi air tanah yang dipantau melalui sistem digital (debit, pompa, tekanan, dsb)	100	Inventarisasi kebutuhan data dan fungsi sistem (debit, tekanan, pompa, jaringan pipa, panel listrik, dan kondisi lapangan).	%	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	-	100	100	terkait				
Inovasi	Kurangnya inovasi kelembagaan P3A dalam mengelola jaringan secara mandiri dan berkelanjutan.	Terselenggaranya evaluasi dan inovasi berkelanjutan dalam penerapan teknologi informasi untuk irigasi air tanah.	Tingkat kepuasan pengguna (internal dan eksternal) terhadap sistem TI irigasi	1	Pemetaan dan evaluasi kelembagaan P3A eksisting untuk mengetahui kondisi, kapasitas, dan kendalanya.	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	-	1	1	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kelembagaan petani pemakai air (P3A/GP3A) belum terbentuk atau tidak aktif.	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan.	Jumlah pelatihan teknis dan manajerial bidang irigasi air tanah yang diselenggarakan	1	Pelatihan dan pendampingan manajemen kelembagaan (administrasi, keuangan, dan pemeliharaan jaringan).	kegiatan	kegiatan sosialisasi petani pemakai air	-	-	-	1	1	terkait				

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
Perencanaan dan Penganggaran	Program rehabilitasi belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lahan pangan.	Perencanaan dan penganggaran kegiatan rehabilitasi irigasi berbasis data dan mendukung ketahanan pangan.	Pagu anggaran diarahkan ke lokasi prioritas pangan.	5	Identifikasi lokasi dan survei awal Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	ha	jaringan irigasi	-	40	-	60	100	terkait	1.988.342.700,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Proses Bisnis dan SOP	Proses bisnis kegiatan irigasi belum terdokumentasi dengan baik.	Proses bisnis rehabilitasi jaringan irigasi yang efektif, efisien, dan terintegrasi.	Dokumen SOP Proses Bisnis diterapkan.	5	Pelaksanaan proses lelang/kontrak pekerjaan fisik pembangunan jaringan irigasi permukaan	ha	jaringan irigasi	-	40	-	60	100	terkait				
Pengawasan	Pengawasan pelaksanaan fisik masih manual.	Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi yang transparan dan berbasis data.	Aplikasi pengawasan aktif.	1	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan	dokumen	Dokumen pengawasan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi	-	-	-	100	100	terkait				
Teknologi Informasi	Sulit memantau kinerja jaringan dan distribusi air.	Digitalisasi manajemen rehabilitasi jaringan irigasi.	Data debit dan progres pekerjaan dapat diakses publik.	1	Integrasi dengan data ketahanan pangan daerah.	dokumen	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	-	1	1	terkait				
Inovasi	Minim inovasi dalam manajemen irigasi berkelanjutan.	Munculnya inovasi dalam pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.	inovasi daerah bidang irigasi/tata air per tahun.	1	Pengembangan Smart Irrigation Area berbasis komunitas petani.	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	-	1	1	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Keterampilan digital rendah.	SDM irigasi yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap teknologi.	petugas lapangan mampu menggunakan aplikasi digital.	1	Pelatihan literasi digital dan penggunaan aplikasi SIMIRIG.	kegiatan	kegiatan sosialisasi pengawas lapangan	-	-	-	100	100	terkait				
Perencanaan dan Penganggaran	Belum ada integrasi antara rencana normalisasi sungai dan kebutuhan air pertanian.	Perencanaan dan penganggaran kegiatan normalisasi sungai berbasis data dan mendukung ketahanan pangan.	Dokumen prioritas normalisasi berbasis data tersedia.	38	Identifikasi lokasi dan survei awal Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	Unit sungai	jaringan irigasi	-	12	13	13	38	terkait				
Proses Bisnis dan SOP	Belum ada SOP terintegrasi antara bidang SDA, Bina Marga, dan lingkungan.	Proses bisnis normalisasi sungai yang efisien, terintegrasi, dan transparan.	Dokumen SOP terintegrasi disahkan.	1	Pelaksanaan proses lelang/kontrak Pekerjaan fisik Normalisasi sungai	dokumen	jaringan irigasi	-	12	13	13	38	terkait				
Pengawasan	Pengawasan lapangan belum optimal.	Pengawasan pelaksanaan normalisasi sungai yang transparan,	Aplikasi e-Monitoring aktif digunakan.	100	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima	kegiatan	pengawasan kegiatan	-	-	-	100	100	terkait				

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
		partisipatif, dan berbasis teknologi.			sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan												
Teknologi Informasi	Tidak ada sistem informasi yang memantau kondisi sungai secara real time.	Pengelolaan sungai berbasis digital dan data spasial.	SIM-Sungai aktif dan terintegrasi dengan data pertanian.	100	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sungai (SIM-Sungai).	%	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	-	100	100	terkait				
Inovasi	Kurangnya inovasi dalam penanganan sedimentasi dan banjir.	Inovasi dalam kegiatan normalisasi sungai yang efisien dan berkelanjutan.	Minimal 1 inovasi diterapkan setiap tahun.	1	Pengembangan Eco-Dredging (normalisasi ramah lingkungan).	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	-	1	1	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya kompetensi dalam penggunaan alat berat dan teknologi monitoring.	SDM pengelola sungai yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap teknologi.	100% petugas lapangan mampu menggunakan aplikasi digital.	1	Pelatihan penggunaan aplikasi SIM-Sungai dan GIS.	kegiatan	kegiatan sosialisasi pengawas lapangan	-	-	-	1	1	terkait				
Perencanaan dan Penganggaran	Pembangunan Embung dan Penapung Air Lainya : Data dasar kurang akurat	Meningkatkan Ketersediaan Air	Jumlah Embung dan Penapung Air Lainnya yang dibangun	3	Identifikasi lokasi dan survei awal Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	unit embung	embung yang dibangun	-	-	1	2	3	terkait				
Proses Bisnis dan SOP	Kualitas material lokal rendah	Meningkatkan mutu material lokal yang digunakan dalam proyek embung	Persentase material lokal yang memenuhi standar kualitas teknis (SNI)	3	Pelaksanaan proses lelang/kontrak pekerjaan fisik rehabilitasi embung	unit embung	embung yang dibangun	-	-	-	3	3	terkait				
Pengawasan	Kelemahan pengawasan lapangan	Meningkatkan kapasitas SDM pengawas	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi pengawasan konstruksi	3	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan	kegiatan	pengawasan kegiatan	-	-	1	2	3	terkait				
Teknologi Informasi	- Tidak ada sistem informasi yang memetakan kondisi embung secara real time.	Pengelolaan Rehabilitasi embung berbasis data dan teknologi informasi.	- SIM-Embung aktif dan digunakan lintas bidang.	100	Rehabilitasi Sistem Informasi Embung (SIM-Embung) berbasis GIS.	%	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	-	100	100	terkait				
Inovasi	- Minim inovasi teknologi dalam desain embung yang efisien air.	Terciptanya inovasi dalam desain, Rehabilitasi, dan pengelolaan embung berkelanjutan.	- Minimal 1 inovasi diterapkan setiap tahun.	1	Rehabilitasi model Smart Embung (embung digital dengan sensor debit dan volume air).	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	-	1	1	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	- Kurangnya kompetensi survei hidrologi, GIS, dan pengawasan mutu.	SDM teknis yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap teknologi.	- 100% petugas lapangan mampu menggunakan aplikasi digital.	1	- Pelatihan Rehabilitasi GIS, drone, dan sistem informasi embung.	kegiatan	kegiatan sosialisasi pengawas lapangan	-	-	-	1	1	terkait				

1.189.526.400,00 Dinas PUPR Dinas PUPR

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
Perencanaan dan Penganggaran	Rehabilitasi Embung dan Penapung Air Lainnya : Data dasar kurang akurat	Meningkatkan Ketersediaan Air	Jumlah Embung dan Penapung Air Lainnya yang dibangun	2	Identifikasi lokasi dan survei awal Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	unit embung	embung yang di rehabilitasi	-	-	2 unit	-	2 unit	terkait	1.241.935.700,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Proses Bisnis dan SOP	Kualitas material lokal rendah	Meningkatkan mutu material lokal yang digunakan dalam proyek embung	Persentase material lokal yang memenuhi standar kualitas teknis (SNI)	2	Pelaksanaan proses lelang/kontrak pekerjaan fisik pembangunan embung	unit embung	embung yang di rehabilitasi	-	-	2 unit	-	2 unit	terkait				
Pengawasan	Kelemahan pengawasan lapangan	Meningkatkan kapasitas SDM pengawas	Jumlah tenaga pengawas yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi pengawasan konstruksi	2	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan	kegiatan	kegiatan	-	-	2	-	2	terkait				
Teknologi Informasi	Tidak ada sistem informasi yang memetakan kondisi embung secara real time.	Pengelolaan pembangunan embung berbasis data dan teknologi informasi.	SIM-Embung aktif dan digunakan lintas bidang.	100	Pengembangan Sistem Informasi Embung (SIM-Embung) berbasis GIS.	%	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	-	100	100	terkait				
Inovasi	Minim inovasi teknologi dalam desain embung yang efisien air.	Terciptanya inovasi dalam desain, pembangunan, dan pengelolaan embung berkelanjutan.	Minimal 1 inovasi diterapkan setiap tahun.	1	Pengembangan model Smart Embung (embung digital dengan sensor debit dan volume air).	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	-	1	1	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurangnya kompetensi survei hidrologi, GIS, dan pengawasan mutu.	SDM teknis yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap teknologi.	100% petugas lapangan mampu menggunakan aplikasi digital.	1	Pelatihan penggunaan GIS, drone, dan sistem informasi embung.	kegiatan	kegiatan sosialisasi pengawas lapangan	-	-	-	1	1	terkait				
Perencanaan dan Penganggaran	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Talang Jawa - Neglasari (R. 137) (Lanjutan) Kec. Merbau Mataram dan Katibung : Jalan kondisi rusak akses terganggu	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar	830	Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED)	meter	Panjang Jalan	-	-	830	-	830	terkait	1.440.000.000,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Proses Bisnis dan SOP	Proses evaluasi proyek jalan jarang berbasis indikator kinerja dan standar teknis	Meningkatkan sistem dokumentasi evaluasi proyek	Persentase laporan evaluasi proyek yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik	830	Pelaksanaan proses lelang/kontrak pekerjaan fisik pembangunan Jalan	meter	Panjang Jalan	-	-	830	-	830	Terkait				
Pengawasan	Pengawasan manual masih dominan; minim penggunaan drone, sensor, atau sistem e-monitoring untuk memantau progres dan kualitas jalan.	Meningkatkan akurasi laporan pengawasan	Persentase laporan pengawasan yang sesuai dengan kondisi lapangan dan standar teknis	1	Monitoring dan pengawasan lapangan Uji fungsi dan serah terima sementara (PHO) Evaluasi dan pelaporan akhir kegiatan	kegiatan	kegiatan	-	-	-	1	1	Terkait				

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL</b>																	
Teknologi Informasi	Data jalan belum terintegrasi dengan sistem pangan daerah.	Digitalisasi data dan informasi infrastruktur jalan pangan.	Dashboard peta jalan pangan aktif dan digunakan lintas OPD.	1	Pengembangan dashboard "Peta Jalan Pangan" berbasis GIS.	dokumen	Dokumen Teknologi Informasi	-	-	1	-	1	Terkait				
Inovasi	Kurang inovasi dalam material atau teknik konstruksi untuk mendukung ketahanan pangan (akses cepat saat musim panen).	Terciptanya inovasi teknologi jalan yang mendukung akses pangan cepat dan efisien.	Minimal 1 inovasi proyek jalan pangan tiap tahun.	3	Inovasi Jalan Logistik Pangan Cepat (material tahan cuaca ekstrem, perkerasan cepat).	dokumen	Dokumen inovasi	-	-	3	-	3	terkait				
Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM teknis dan pengawas belum semua tersertifikasi.	SDM kompeten dan memahami keterkaitan infrastruktur dengan ketahanan pangan.	Minimal 70% SDM teknis tersertifikasi dan mengikuti pelatihan tematik pangan.	100	Pelatihan dan sertifikasi teknis rekonstruksi jalan.	kegiatan	kegiatan sosialisasi pengawas lapangan	-	-	-	100	100	Terkait				

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 2025

RENCANA AKSI RB MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN																	
Proses Bisnis dan SOP	Masih adanya Posyandu yang belum memberikan Layanan Siklus Hidup di wilayah Kabupaten Lampung selatan	Meningkatnya jumlah Posyandu yang memberikan Layanan Siklus Hidup di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Jumlah Posyandu	28	Melaksanakan Sosialisasi terkait Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas (28 Puskesmas) dengan sasaran Kepala Desa, Bidan Desa dan Kader Posyandu	Posyandu	Jumlah Posyandu yang Mengikuti Sosialisasi	-	50%	50%	-	100%	Terkait	107.990.400	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Masih Adanya Ibu Hamil Kematian Ibu dan bayi Beresiko Tinggi	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi	Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi	250	Melaksanakan Kegiatan Kelas Ibu Hamil	Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mengikuti Kelas Ibu	-	-	-	100%	100%	Terkait	15.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Kader ILP dalam memberikan Layanan sesuai standar Pelayanan di Posyandu Siklus Hidup	Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan kader dalam memberikan Layanan Kesehatan di Posyandu Siklus Hidup	Jumlah Kader Posyandu Bidang Kesehatan	300	Melakukan Kegiatan Temu Kader	Orang	Jumlah Kader yang memahami dalam memberikan pelayanan Kesehatan di Posyandu Siklus Hidup	-	-	-	100%	100%	Terkait	18.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Masih adanya ibu hamil, bayi baru lahir dan ibu nifas yang belum mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	ibu hamil, bayi baru lahir dan ibu nifas	jumlah angka kematian ibu, bayi baru lahir dan ibu melahirkan	250	Melakukan Kegiatan Bumil Sehat	Orang	Jumlah Ibu Hamil yang hadir dan memahami tentang standar layanan kesehatan Ibu Hamil	-	-	100%	-	100%	Terkait	15.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Cetar Kesehatan ( Cerita Seputar Kesehatan)	Kurangnya Publikasi tentang kesehatan melalui media Podcast	Membangun suatu sistem Promosi Kesehatan yang mudah dipublikasikan dan dipahami oleh masyarakat secara luas di Kabupaten Lampung Selatan sehingga tujuan dari Promosi kesehatan dapat tercapai dengan cara pelaksanaan yang lebih , efektif dan efisien.	Tim yang akan terlibat dalam Podcast	100%	Melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan Podcast	Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi terkait Podcast	-	-	100%	-	100%	Terkait	3210000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Narasumber dan Presenter Podcast	100%	Mengoprasionalkan Podcast dan mempublikasikan melalui media	orang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi terkait Podcast	-	-	-	100%	100%	Terkait	12500000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Inter Profesional Colaboration (IPC)	Kurangnya kerjasama dan komunikasi antar petugas Kesehatan terkait penanganan pasien	Memberikan pelayanan kesehatan paripurna terhadap masyarakat di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan sehingga meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan diPuskesmas	Puskesmas	28	Meningkatkan Kerjasama antar tenaga Kesehatan dokter dan apoteker	Puskesmas	Jumlah Dokter dan Apoteker	-	-	-	100%	100%	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Puskesmas	28	Mencegah terjadinya medication error	Puskesmas	Jumlah Dokter dan Apoteker	-	-	-	100%	100%	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Proses Bisnis dan SOP	Masih adanya balita stunting di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka prevalensi stunting	Balita stunting menerima PKMK	100%	Melaksanakan pemberian PKMK kepada balita stunting yang sudah di rujuk dan di rekomendasikan oleh DSA	on kasus (sampai saat ini Oktober 2025 sebanyak 75 anak dirujuk dan direkomendasi oleh DSA)	Jumlah balita stunting yang menerima PKMK	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	50.000.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas
	Masih adanya balita gizi kurang (wasting) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka balita gizi kurang (wasting)	Balita gizi kurang (wasting) mendapat PMT Lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada balita gizi kurang (wasting)	5742	Jumlah balita wasting mendapat PMT Lokal	-	50%	-	50%	100%	Terkait	2.862.623.400	KUPT Puskesmas	Puskesmas
	Masih adanya ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka ibu hamil KEK	Ibu Hamil KEK mendapat PMT Lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada Ibu Hamil KEK	1.079	Jumlah Ibu Hamil KEK mendapat PMT Lokal	-	50%	-	50%	100%	Terkait	2.715.486.000	KUPT Puskesmas	Puskesmas
Pengawasan	Pencatatan dan pelaporan	Maksimalnya pencatatan dan pelaporan	Puskesmas melakukan pencatatan dan monev kepada puskesmas	100%	Melakukan feedback dan monev kepada puskesmas	28	Puskesmas	-	-	-	100%	100%	Terkait	-	Dinas Kesehatan	Puskesmas
Perencanaan dan Penganggaran	belum adanya fasilitas pelayanan kesehatan untuk jantung di RSUD	Tersedianya Pelayanan Kesehatan jantung untuk Masyarakat Lampung Selatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jantung	1 unit	Pembangunan Gedung Cathlab	unit	Jumlah Gedung yang dibangun	-	-	1 unit	-	1 unit	terkait	Rp2.500.000.000	RSUD	RSUD
	Belum lengkapnya fasilitas untuk rawat inap penyakit syaraf	Terpenuhinya fasilitas untuk rawat inap penyakit syaraf	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Syaraf	1 unit	Pembangunan gedung rawat inap penyakit syaraf	unit	Jumlah Gedung yang dibangun	-	-	1 unit	-	1 unit	terkait	Rp3.000.000.000	RSUD	RSUD
	Belum tersedianya dokter spesialis jantung intervensi	Tersedianya dokter spesialis jantung intervensi	Jumlah dokter spesialis yang	1 orang	Mengusulkan dokumen PKS	orang	Jumlah dokter spesialis jantung intervensi	-	-	1 orang	-	1 orang	Terkait	-	RSUD	RSUD

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
	jantung intervensi untuk layanan jantung		lebih berkompeten		dengan rumah sakit pengampu												
Proses Bisnis dan SOP	Masih terdapat keluhan terkait pelayanan RS yang berada di luar portal resmi RS baik online maupun offline	Kepuasan terhadap pelayanan RS	Pengaduan	4 pengaduan	memeringat tim humas RS untuk menyelesaikan pengaduan	pengaduan	Jumlah pengaduan	1	Rp1	Rp1	1	4 pengaduan	terkait	-	RSUD	RSUD	
Sumber Daya Manusia (SDM)	perlu adanya peningkatan kompetensi SDM kesehatan guna menunjang pelayanan dan menciptakan pelayanan baru agar Pelayanan Kesehatan RSUD dapat menangani segala macam Keluhan Kesehatan warga Lampung Selatan	Tersedianya SDM bidang keperawatan yang lebih berkompeten	Jumlah SDM keperawatan RSUD	120 Orang	aduan	Orang	SDM Keperawatan	-	60	60	-	120	terkait	13152510	RSUD	RSUD	
	perlu adanya peningkatan kompetensi SDM kesehatan guna menunjang pelayanan dan menciptakan pelayanan baru agar Pelayanan Kesehatan RSUD dapat menangani segala macam Keluhan Kesehatan warga Lampung Selatan	Tersedianya SDM dokter spesialis untuk layanan Kanker dan Haemodialisa yang lebih berkompeten	Jumlah dokter spesialis yang lebih berkompeten	2 orang	Mengikutsertakan dokter spesialis untuk program Fellowship Tatalaksana Penyakit Ginjal dan Dialisis dan program Fellowship Onkologi	Orang	dokter spesialis yang lebih berkompeten	-	1	-	1	2	Terkait	-	RSUD	RSUD	
	kurangnya petugas admin yang mengelola aplikasi, peralihan SIMRS versi terbaru	Terpenuhinya penambahan petugas admin pengelola SIM RS	Jumlah petugas admin pengelola SIM RS	1 orang	Menambah petugas admin untuk mengelola aplikasi SIMRS	orang	Jumlah Petugas Admin SIMRS	-	-	-	1	1	Terkait	-	RSUD	RSUD	
Pengawasan	Kurangnya komitmen nyata dari semua unsur di RS, tidak semua temuan audit di tindaklanjuti serius sehingga menjadi temua berulang	Semua unsur di RS	Jumlah tindak lanjut dari hasil temuan audit internal	11 laporan audit	Tindak lanjut oleh bidang terkait hasil temua audit internal (SPL)	Laporan	Jumlah audit Internal yang ditindaklanjuti	3	3	3	2	11	Terkait	-	RSUD	RSUD	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Teknologi Informasi	SIMRS masih menggunakan aplikasi desktop yang mana tidak semua device dapat mengakses, hanya bisa menggunakan laptop dan komputer, menjadi tidak fleksibel	Meningkatnya kualitas isi data Rekam Medis Elektronik kedalam SIMRS	Jumlah sistem	1 Paket	mengadakan perbaikan/update SIMRS serta sosialisasi pada petugas agar lebih mempermudah dalam isi data Rekam Medis Elektronik	Paket	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	-	-	-	1 paket	1	terkait	-	RSUD	RSUD
Balsem TB	Semakin banyak nya kasus TB RO sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan tujuan untuk mengurangi resiko penularan dan efesiensi waktu pengobatan dan pelayanan di rumah sakit	Pasien TB RO yang berobat di RSUD dr.H. Bob Bazar,SKM	Jumlah Pasian TB RO	12 orang	TB RO yang berobat di RSUD dr.H. Bob Bazar,SKM	Orang	Jumlah pasian TB RO	12	12	12	12	12	Terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Siuda	Pemakaian alat (tabung dialiser) yang berulang dengan cara dibersihkan dan disterilkan setiap kali pemakaian	Pasien gagal ginjal kronik yang melakukan Dialisis (cuci darah)	Jumlah pasien cuci darah	56 orang	1. Menggunakan Dialyzer single use 2. Menggunakan Dialyzer High flux 3. Tidak Melakukan pembersihan Dialyzer bekas pakai	Orang	Jumlah pasien cuci darah	25	50	75	100	250	Terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Fermentasi Thalasboba	Pemeriksaan cek feritin dilakukan di luar Kab. Lampung Selatan dan konsultasi dengan dokter spesialis hematologi onkologi di lakukan secara langsung / offline di Bandar Lampung setiap 3 bulan sekali ( RS Immanuel Bandar Lampung)	pasien thalasemia RSUD dr H Bob Bazar SKM	Jumlah pasien thalasemia RSUD dr H Bob Bazar SKM	27 pasien	mengadakan cek feritin di RSUD dr H Bob Bazar SKM dan melakukan telemedicine dilakukan secara online dengan Spesialis Hematologi Onkologi di RSUD dr H Bob Bazar SKM	Orang	pasien thalasemia RSUD dr H Bob Bazar SKM	27 pasien	Terkait	-	RSUD	RSUD				

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Sapera	Terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten lampung selatan	warga masyarakat kabupaten lampung selatan	jumlah perempuan dan anak yang memperoleh pelayanan	61 orang	1.Memberikan pelayanan terhadap korban secara terpadu terintegrasi berkesinambungan 2. Mencegah dan mendeteksi lebih dini terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak	orang	jumlah perempuan dan anak yg memperoleh kekerasan	25	50	75	100	250	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Garapan Toro	Untuk Memantau kepatuhan pasien minum obat TB dan relaksasi fisikis pasian	Pasian TB RO yg berobat di RSBB	Jumlah pasian TB RO	12 orang	1. Membuat gajebu untuk tempat pasian minum obat 2.Untuk pemantauan minum obat	orang	jumlah pasian TB RO	12	12	12	12	12	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Pantai Thalasboba	Peningkatan Pasien THalasemia setiap tahunnya di RSUD dr H Bob Bazar SKM	Para remaja di sekolah menengah atas dan keluarga pasien thalasemia	Jumlah remaja sekolah menengah atas dan keluarga pasien thalasemia	150 orang	mengadakan sosialisasi dengan remaja di sekolah menengah atas dan sosialisasi dengan keluarga pasien (POPTI)	orang	Jumlah remaja sekolah menengah atas yang mendapat sosialisasi	50 orang	50 orang	50 orang		150 orang	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Cepat Asik	Tingginya angka kecemasan pada Pasien Perawatan di Ruang Anak	Pasien yang sedang melakukan perawatan di ruang anak	Menurunnya kecemasan pada anak yang sedang perawatan, menjalin komunitasi yang lebih baik antar penunggu pasien dan meningkatnya kepuasan pasien dan keluarga	36 kegiatan	Mengadakan kegiatan mendongeng, berdoa bersama dan bermain bersama	kegiatan	pasien anak yang mengalami kecemasan saat menjalani perawatan di ruang anak	9	9	9		36	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
Mechat	Pemanfaatan inovasi pada pasien non diet ruang perawatan vip kurang efektif dikarenakan jumlah pasien yang di intervensi terlalu sedikit	Pasien non diet ruang perawatan VIP	Jumlah pasien non diet di ruang VIP	100 orang	Memberikan menu pilihan diet pada waktu sarapan	orang	Jumlah pasien non diet ruang VIP	25	25	25	25	100	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
NAPAK BOOST	Aplikasi NAPAK BOOST belum dapat berjalan sebagaimana rencana yang telah dilakukan	Pegawai ASN Rumah Sakit	tertib administrasi pegawai RSUD	1 paket	menciptakan program untuk database pegawai RSUD guna mempermudah pegawai RSUD dalam melakukan kenaikan pangkat	paket	kenaikan pangkat pegawai RSUD	-	-	-	1	1	terkait langsung dengan masyarakat	-	RSUD	RSUD
PENYU TERGODHA	belum adanya alat pemeriksaan viral load untuk pasien dengan HIV aids	masyarakat dan pasien dengan HIV aids	tidak timbulnya infeksi oportunistik pada	2 semester	menciptakan program pelayanan menyeluruh pada	semester	kepatuhan minum obat dan tersupresi	-	Semester 1	-	Semester 2	2	terkait	-	RSUD	RSUD

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsgung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
	mengevaluasi pengobatan pasien		pasien dan terjadinya penularan terhadap pasangan		aspek Bio, psiko, sosial,spiritual pada pasien HIV aids		virus pada pada pasien										
Perencanaan dan Penganggaran	Belum Terlindunginya Para Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terlindungi BPJS Ketenaga Kerjaan	Para Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terlindungi BPJS Ketenaga Kerjaan	Jumlah pekerja DBH sawit	1485 orang	Memberikan perlindungan bagi para pekerja perkebunan sawit	orang	Jumlah pekerja yang terlindungi	-	-	1485	1485	1485	terkait	149.688.000	Disnakertrans	Disnakertrans	
Proses Bisnis dan SOP	Data Calon Peserta diterima dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan kurang valid	data yang disajikan valid	Klasifikasi data pekerja yang usia produktif	1 Dokumen Klasifikasi	Memberikan klasifikasi data calon penerima yang layak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Dinas TPHBUN	Dokumen	Dokumen Klasifikasi Data Calon Penerima BPJS Ketenagakerjaan	-	-	1	-	1	terkait	-	Disnakertrans	Disnakertrans	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Kurang nya SDM Personil di bidang Hubungan Industri	Tersedianya SDM dibidang H.I	Jumlah SDM di Bidang H.I	5 Orang	Mengajukan Pengusulan Ke BKD	Dokumen	Dokumen usulan penambahan mediator	-	-			1	1	terkait	-	Disnakertrans	Disnakertrans
Sumber Daya Manusia (SDM)	untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu berharap agar pemerintah juga dapat memberikan bantuan biaya transport pengobatan, biaya akomodasi dan biaya hidup sehari-hari selama menjalani pengobatan.	masyarakat kabupaten lampung selatan	jumlah orang yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit jakarta	3 orang	mengajukan anggaran kegiatan bantuan akomodasi	orang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan akomodasi untuk pengobatan selama berada di rumah singgah	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang	DINAS SOSIAL	Rp.15.000.000	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	
Perencanaan dan Penganggaran	Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dapat diakses untuk keperluan pelayanan Kesehatan dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan belum memiliki ISO27701 tentang Keamanan Ciber	Mempersiapkan / Membangun Sistem Keamanan Cyber	Jumlah Sistem Keamanan Cyber	1	Koordinasi dengan OPD terakit (Diskominfo/TAPD) untuk memenuhi Sistem Keamanan Cyber)	Kegiatan	Sistem Keamanan Cyber	-	-	-	100 %	100 %	Tidak	350.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsgung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Proses Bisnis dan SOP	Proses bisnis Dukcapil sangat kompleks, Mengintegrasikan persyaratan ISO 27001, seperti manajemen risiko atau kontrol akses, ke dalam sistem yang sudah ada bisa menjadi tantangan yang sulit.	Mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara bertahap	Kontrol Akses	1	Menyiapkan SOP, Membentuk Tim Kerja, Lakukan audit internal secara rutin untuk memantau efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kegiatan	audit internal secara rutin untuk memantau efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	-	100%	100 %	Tidak	35.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil
Sumber Daya Manusia (SDM)	Perlunya pendampingan bagi operator yang ditugaskan untuk mengakses sistem database dukcapil	kemudahan mengakses sistem database dukcapil	pengguna akses database	1	Menyiapkan pendampingan dan pelatihan bagi operator pengguna database dukcapil	Kegiatan	pendampingan dan pelatihan bagi operator pengguna da	-	-	-	100%	100 %	Tidak	80.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil
Pengawasan	Tidak ada program pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang pelatihan terhadap kinerja operator.	Pembinaan berkelanjutan	Petugas Operator pengakses database dukcapil	1	petugas operator akan terus dibina dan dimonitoring secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait pengamanan data dan prosedur operasional.	Kegiatan	monitoring secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka terkait pengamanan data dan prosedur operasional.	-	-	-	100%	100 %	Tidak	50.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil
Teknologi Informasi	Perlunya dukungan Perangkat keras dan jaringan	Sistem pelayanan yang terintegrasi dan didukung oleh Konektivitas internet	Perangkat Keras dan Jaringan Konektivitas Internet	1	Menyiapkan Perangkat Keras, Aplikasi, serta Jaringan Konektivitas Internet yang memadai	Kegiatan	Perangkat Keras, Aplikasi, serta Jaringan Konektivitas Internet yang memadai	-	-	-	100	100 %	Tidak	100.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil
Inovasi	Terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas	Orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas	kepemilikan dokumen kependudukan bagi orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas	250	Melakukan Pelayanan keliling YANDUKSATLANTAS (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas)	dokumen	Pelayanan keliling YANDUKSATLANTAS (Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi orang sakit, lansia dan penyandang disabilitas)	55	65	65	65		Terkait	55.000.000	Disdukcapil	Disdukcapil
Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan investasi tidak sepenuhnya terintegrasi dengan dokumen perencanaan investasi daerah	Sinkronisasi program/kegiatan dengan prioritas investasi yang masuk RKPD	Persentase program/kegiatan perizinan & investasi yang masuk RKPD	100	Review & sinkronisasi dokumen perencanaan (Renstra, RKPD) dengan target investasi	persen	Dokumen RKPD/Renja yang telah diintegrasikan	25	50	75	100	100	Tidak	33.580.000	Sekretariat DPMPPPTSP	Sekretariat DPMPPPTSP

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
Proses Bisnis dan SOP	SOP pelayanan investasi masih berbelit dan kurang efisien	Penyederhanaan SOP agar waktu pelayanan lebih singkat	Jumlah SOP baru yang disederhanakan dan digitalisasi	5	Review, pemangkasan alur, dan digitalisasi SOP perizinan	jumlah	SOP (dokumen)	-	-	-	5	5	Tidak	16.051.650	Bidang Perizinan	Bidang Perizinan
Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM pelayanan perizinan kurang menguasai OSS & regulasi terbaru	SDM kompeten, responsif, dan paham regulasi investasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan OSS & pelayanan prima	11	Pelatihan OSS, regulasi investasi, dan etika pelayanan	orang	Sertifikat pelatihan	-	-	11	-	11	Tidak	214.555.800	Bidang Pengawasan Penanaman Modal	Bidang Pengawasan Penanaman Modal
Pengawasan	Pengawasan internal pelayanan investasi masih lemah	Peningkatan pengawasan dan kepatuhan SOP	Jumlah audit internal per tahun	2	Audit layanan & evaluasi kinerja investasi	dokumen	Laporan hasil audit	-	-	-	2	2	Tidak	9.474.000	Sekretariat DPMPPPTSP	Sekretariat DPMPPPTSP
Teknologi Informasi	Layanan belum sepenuhnya dilakukan secara ditigilasasi	Optimalisasi aplikasi pusat & aplikasi daerah	Jumlah layanan yang terdigitalisasi	40	Optimalisasi layanan perizinan secara digitalisasi	jumlah	Layanan perizinan secara digitalisasi	-	-	-	40	40	Terkait	325.888.600	Bidang Perizinan	Bidang Perizinan
Inovasi	Proses penerbitan SIP manual memakan waktu lama (karena pengumpulan dokumen fisik, tatap muka, dan verifikasi manual)	Mempercepat waktu penerbitan SIP,Memudahkan tenaga kesehatan untuk mengurus SIP tanpa harus datang ke kantor dinas,Meningkatkan transparansi & akuntabilitas dengan tracking status permohonan secara real-time	Jumlah permohonan SIP yang diproses secara online	30	Pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan online	jumlah	aplikasi	-	-	30	0	30	Terkait	325.888.600	Bidang Perizinan	Bidang Perizinan
Pengawasan	Perlunya dilakukan pengawasan internal terkait pelayanan publik bidang kesehatan	Terwujudnya pengawasan terkait pelayanan publik bidang kesehatan	Jumlah pengawasan terkait pelayanan publik bidang kesehatan	2 Keg	Melakukan reviu pelayanan publik pada RSUD Bob Bazar dan UPTD Puskesmas	UPTD Puskesmas	Jumlah UPTD yang dilakukan reviu pelayanan publik	-	-	-	18	18	Terkait	-	Inspektorat	Inspektorat
					Melakukan audit ketataan pada UPTD puskesmas	UPTD Puskesmas	Jumlah UPTD yang dilakukan audit	11	-	-	-	11	tidak	Rp47.950.000	Inspektorat	Inspektorat

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
 TANGGAL : 2025

**RENCANA AKSI RB MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN  
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN</b>																	
Perencanaan dan Penganggaran	Belum terpenuhinya sarana prasarana satuan pendidikan	Terpenuhinya sarana prasarana satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP	Jumlah APE PAUD	183	Melakukan Pengadaan APE	paket	Jumlah APE yang tersedia	-	84	99	-	183	Terkait	6.733.587.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Jumlah Pembangunan Ruang Guru SD	1	Melakukan Pembangunan Ruang Guru	ruang	jumlah ruang yang dibangun	-	1	-	-	1	Terkait	181.706.656	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN																	
				Jumlah Pembangunan Ruang UKS SD	2	Melakukan Pembangunan Ruang UKS SD	unit	jumlah UKS yang dibangun	-	-	2	-	2	Terkait	336.968.784	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Pembangunan Perpustakaan SD	6	Melakukan Pembangunan Perpustakaan	ruang	jumlah perpustakaan yang dibangun	-	-	6	-	6	Terkait	1.059.018.588	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah SD	13	Melakukan Pengadaan Mebel Sekolah	paket	Jumlah Meubelair yang diterima	-	-	13	-	13	Terkait	1.236.516.450	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar	2	Melakukan Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Dasar	sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	-	2	-	2	Terkait	1.063.946.208	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Ruang Kelas Baru SD	12	Melakukan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	12	-	12	Terkait	7.624.969.693	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SD	27	Melakukan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	ruang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	27	-	27	Terkait	13.639.490.030	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Jamban) SD	14	Melakukan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Jamban) SD	unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Jamban)	-	-	14	-	14	Terkait	3.010.142.219	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMP	2	Melakukan Rehabilitasi Ruang kelas sekolah Sedang/Berat	ruang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	2	-	2	Terkait	1.210.672.609	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMP	1	Melakukan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Sedang/Berat	ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1	-	-	1	Terkait	333.442.600	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Ruang Kelas Baru SMP	1	Melakukan Pembangunan Ruang Kelas Baru	ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	1	-	1	Terkait	365.426.703	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	7	Melakukan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	7	-	-	7	Terkait	357.680.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih rendahnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pendidik	Jumlah tenaga Pendidik yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	100	Melakukan Bimbingan Teknis Membaca Nyaring terhadap tenaga pendidik PAUD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	100	-	100	Terkait	(dana Perpus)	dinas Pepustakaan dan Arsip	dinas Pepustakaan dan Arsip	
				36	Melakukan Bimbingan Pembelajaran Mendalam terhadap tenaga pendidik PAUD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	36	-	36	Terkait	(dana BOSP)	Kemendikdasmen	BGTK	
				384	Melakukan Bimbingan Pembelajaran Mendalam terhadap tenaga pendidik SD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	384	-	384	Terkait	(dana BOSP)	Kemendikdasmen	BGTK	
				128	Melakukan Bimbingan Teknis Coding terhadap tenaga pendidik SD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	128	-	128	Terkait	(dana BOSP)	Kemendikdasmen	Mitra LDP	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana			
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana		
RB TEMATIK MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN																		
Masih rendahnya mutu dan kualitas tenaga Kependidikan						50	Melakukan Bimbingan Teknis Membaca Nyaring terhadap tenaga pendidik SD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	50	-	50	Terkait	(dana Perpus)	dinas Pepustakaan dan Arsip	
						60	Melakukan Bimbingan Teknis terhadap tenaga pendidik SD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	0	60	60	Terkait	24.333.450	Disdik LS	Bidang GTK
						200	Melakukan Bimbingan Pembelajaran Mendalam terhadap tenaga pendidik SMP	orang	Jumlah peserta bimtek yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	200	-	200	Terkait	(dana BOSP)	Kemendikdasmen	BGTK
						47	Melakukan Bimbingan Teknis Coding terhadap tenaga pendidik SMP	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	47	-	47	Terkait	(dana BOSP)	Kemendikdasmen	Mitra LDP
						34	Melakukan Bimbingan Teknis Coding terhadap tenaga pendidik Smp	orang	Jumlah peserta bimtek yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	-	34	34	Terkait	22.899.050	Disdik LS	Bidang GTK
						1	Melakukan Bimbingan Teknis terhadap tenaga Kependidikan SD	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	-	1	1	Terkait	(APBN)	Kemendikdasmen	BGTK
						3	Melakukan Bimbingan Teknis terhadap tenaga Kependidikan SMP	orang	Jumlah peserta bimtek yang melakukan pengimbasan	-	-	-	3	3	Terkait	(APBN)	Kemendikdasmen	BGTK
						200	bimtek peningkatan kapasitas pustakawan	orang	Jumlah peserta bimtek yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	-	200	200	Terkait	(pelaksana : Dinas Perpussip LS)	dinas Pepustakaan dan Arsip	dinas Pepustakaan dan Arsip
						60	bimtek peningkatan kapasitas pustakawan	orang	Jumlah peserta bimtek yang mendapatkan peningkatan kompetensi	-	-	-	60	60	Terkait	(pelaksana : Dinas Perpussip LS)	dinas Pepustakaan dan Arsip	dinas Pepustakaan dan Arsip
Inovasi	Masih rendahnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap siswa berprestasi	Meningkatnya Siswa yang berprestasi	Jumlah Siswa berprestasi	40	Melakukan pemberian beasiswa terhadap siswa Sekolah Dasar berprestasi	siswa	jumlah siswa yang menerima beasiswa	-	-	36	-	36	Terkait	54.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
				50	Melakukan pemberian beasiswa terhadap siswa Sekolah Menengah Pertama berprestasi	siswa	jumlah siswa yang menerima beasiswa	-	-	39	-	39	Terkait	78.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
	Masih terdapat anak usia Sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah	Menurunnya angka putus sekolah dan tidak sekolah	Jumlah angka putus sekolah dan tidak sekolah	7496	Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat yang putus sekolah dan tidak sekolah untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan kesetaraan	orang	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	7496	-	7496	Terkait	425.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum tercapainya target peserta didik yang mendapatkan skrining kesehatan di sekolah	meningkatkan jumlah peserta didik yang dilakukan skrining kesehatan di sekolah	Jumlah peserta didik yang di skrining kesehatan di sekolah	100	Melakukan skrining kesehatan peserta didik di sekolah	%	Jumlah peserta didik yang mendapatkan skrining kesehatan di sekolah	25	25	25	25	100	Terkait	pelaksana puskesmas (Dana BOK Puskesmas)	Dinas Kesehatan	Puskesmas		
Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif,	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Jumlah Kegiatan Advokasi Kebijakan	50	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan	Lembaga	Jumlah Lembaga Penerima Advokasi	10	-	40	-	50	Terkait	156.845.250	Dinas PPPA	Dinas PPPA		

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK MENDORONG PENINGKATAN AKSES, KUALITAS DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN</b>																	
	khususnya hak atas pendidikan	Lembaga Pendidikan, Kesehatan, Media dan Dunia Usaha.	Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak		Pemenuhan Hak Anak Terhadap 50 Lembaga		Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak										
Pengawasan	Masih Adanya Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat	Meningkatkan Pengetahuan Dan Peran Serta Sekolah, Tenaga Pendidik Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Lembaga Di Satuan Pendidikan Dan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Masyarakat Yang Mendapat Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	9	Advokasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Anak	Lembaga	Jumlah Lembaga Penerima Advokasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Dan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Anak	-	-	9	0	9	Terkait	140,000,000	Dinas PPPA	Dinas PPPA	
Teknologi Informasi	Masih adanya satuan pendidikan yang belum terlibat memanfaatkan media literasi publik sebagai sarana pembelajaran	peningkatan jaringan internet pada satuan Pendidikan	Jumlah kegiatan Talkshow "Anak Bangsa Cerdas" di Radio dbFm 93.00 Fm	48	Melakukan Talkshow "Anak Bangsa Cerdas" terhadap peserta didik (satuan pendidikan) di Radio DbFm 93.00 Fm	kegiatan	Jumlah Sekolah yang terlibat pemanfaatan media literasi publik	12	12	12	12	48	Terkait	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
Proses Bisnis dan SOP	Masih adanya masyarakat usia perguruan tinggi sekolah yang tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikan	Tersedianya rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Masyarakat Usia Sekolah dan Perguruan Tinggi	Jumlah masyarakat usia sekolah dan perguruan tinggi yang menerima rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)	822	Penerbitan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Dokumen	Jumlah Surat Rekomendasi	440	132	239	-	822	Terkait	-	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 2025

RENCANA AKSI RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)																	
	Masih adanya balita gizi kurang (wasting) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka balita gizi kurang (wasting) di Kabupaten Lampung Selatan	Balita gizi kurang (wasting) menerima PMT lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada balita gizi kurang (wasting)	Orang	Jumlah balita wasting	-	50%	-	50%	100%	Terkait	4.081.308.000	KUPT Puskesmas	Puskesmas	
	Masih adanya balita stunting di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	Menurunnya angka balita stunting di Kabupaten Lampung Selatan	Balita Stunting menerima PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus)	100%	Melaksanakan pemberian PKMK kepada balita stunting yang sudah dirujuk dan direkomendasikan oleh DSA	Orang	Jumlah balita stunting dirujuk DSA	25%	25%	25%	25%	100%	Terkait	50.000.000	Dinas Kesehatan	Puskesmas	
	Masih adanya Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronik) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan)	Menurunnya angka Ibu Hamil KEK di Kabupaten Lampung Selatan	Ibu Hamil KEK menerima PMT Lokal	100%	Melaksanakan pemberian PMT Lokal kepada Ibu Hamil KEK	Orang	Jumlah Ibu Hamil KEK	-	50%	-	50%	100%	Terkait	3.281.760.000	KUPT Puskesmas	Puskesmas	
	Masih adanya anemia pada remaja putri	Menurunnya angka anemia remaja putri	Remaja Putri kls 7 dan 10 di skrining Hb	80%	Melaksanakan pemeriksaan Skrining Hb remaja putri kls 7 dan 10 dalam rangka pencegahan anemia	Orang	Remaja Putri kls 7 dan 10	20%	20%	20%	20%	80%	Terkait	443.704.900	Dinas Kesehatan	Puskesmas	
Sumber Daya Manusia (SDM)	Banyak Tenaga Pendidik yang belum memahami permasalahan tentang stunting	Tenaga Pendidik PAUD	Tendik Memahami Pravalsensi stunting	100 %	Bimtek Tendik PAUD dan Sosialisasi Kurikulum PAUD	Orang	Jumlah Tendik yang dilatih Bimtek	20%	20%	20%	20%	80%	Terkait	Rp. 26.627.100	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Perencanaan dan Penganggaran	terkait dengan kemiskinan dan akses pangan serta pola asuh pemberian makan kepada balita. stunting berdampaaak pada kualitas SDM yang mana akan menurunkan produktifitas SDM	1000 jiwa	KPM stunting	1000 jiwa	Pembuatan Buku stunting, penyuluhan stunting dari SDM PKH	3-5 buku	fakir miskin yang menerima jaminan sosial	500 buku	-	500 buku	-	1000 buku	Terkait	82.870.200	Linjamsos	DPA linjamsos	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : Kapasitas	Meningkatkan cakupan layanan air minum melalui	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	1000	Peningkatan Penyediaan Air Minum (SPAM)	liter/detik	Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	-	-	931	931	terkait	8.112.062.344,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)</b>																	
	sistem yang tidak memadai	jaringan perpipaan.	Perpipaan yang ditingkatkan		Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan												
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : Pemilihan lokasi sumber air baku tidak tepat	Meningkatkan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan.	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5	Pembangunan Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	liter/detik	Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	-	5		5	terkait	5.573.455.738,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan : Tingkat kehilangan air (NRW) tinggi, menyebabkan distribusi ke area baru tidak optimal.	Meningkatkan cakupan layanan air minum melalui jaringan perpipaan.	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1631	Perluasan Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	SR	Sambungan Rumah yang ditingkatkan	-	-	1631		1631	terkait	6.213.368.834,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) : Minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lumpur tinja.	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak dan aman	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	3600	Identifikasi lokasi dan survei awal	M³/Hari	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	-	-	3600		3600	terkait	5.356.924.300,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman : Partisipasi masyarakat rendah, karena kurangnya sosialisasi atau ketidakpahaman manfaat SPALD	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak dan aman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala Permukiman	-	-	4		4	terkait	1.779.358.949,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
Perencanaan dan Penganggaran	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan : Kurangnya pemantauan kualitas efluen secara berkala dan terukur.	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak dan aman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	3	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	unit	Pengelolaan Air Limbah Domestik skala Perkotaan yang tersedia	-	-	3		3	terkait	1.444.953.280,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja : Jumlah kendaraan tidak sesuai dengan cakupan wilayah layanan atau	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak dan aman	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	unit	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang tersedia	-	-	1	-	1	terkait	1.273.313.935,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masyarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING)</b>																	
	jumlah rumah tangga yang harus dilayani.																
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat : kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem pengelolaan limbah yang aman	Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak dan aman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	250	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	-	250	-	250	terkait	2.840.952.000,00	Dinas PUPR	Dinas PUPR	
	Penurunan angka Prevalensi Stunting melalui dukungan Program Bangga Kencana	1. TPK 2. Keluarga Berisiko Stunting	KRS ter audiensi / mendapatkan pendampingan oleh TPK	80 %	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting oleh TPK dan Melakukan pencatatan hasil pendampingan	orang / kader	2238 orang kader	20%	20%	20%	20%	80%	terkait	4.923.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran dengan promosi KBPP	Pasangan Usia Subur	cakupan Peserta KB Pasca Salin	100%	Sosialisasi KBPP	orang	Jumlah Sosialisasi KBPP	25%	25%	25%	25%	100%	terkait	63.810.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan KB dan kespro	Fasekes	Cakupan tenaga kesehatan yg melakukan pembinaan	100%	Pembinaan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB dan Kespro	orang	Jumlah Pembinaan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB dan Kespro	25%	25%	25%	25%	100%	terkait	49.771.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Penurunan angka TFR per PUS dengan cara Yan-KB	Pasangan Usia Subur	Cakupan Peserta KB Aktif yg menggunakan KB MKJP	100%	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	orang	Peserta KB Aktif yg menggunakan KB MKJP	25%	25%	25%	25%	100%	terkait	54.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Peningkatan angka ASFR dengan pendidikan kesehatan reproduksi	1. Genre 2. PIK R	Cakupan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja	100%	Promosi dan konseling pendidikan kesehatan reproduksi	orang	Jumlah peserta pendidikan kesehatan reproduksi	25%	25%	25%	25%	100%	terkait	93.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL :  
 2025

RENCANA AKSI RB PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARG ET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATO R	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
<b>RB TEMATIK PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</b>																
Sumber Daya Manusia (SDM)	Rendahnya pemahaman pelaku IKM terhadap proses dan manfaat TKDN	Meningkatkan kesadaran dan minat IKM untuk mengurus sertifikat TKDN	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi sertifikasi TKDN IK	100	Sosialisasi manfaat dan prosedur sertifikasi TKDN bagi pelaku usaha	pelaku usaha	jumlah pelaku usaha	-	-	100	-	100	Terkait	6,400,0000	Disdagperin	Disdagperin
	Melaksanakan sosialisasi internal tentang regulasi P3DN	Sosialisasi sertifikasi TKDN untuk pelaku usaha	Jumlah kegiatan sosialisasi sertifikasi TKDN yang dilaksanakan	100	Terlaksanannya Sosialisasi sertifikasi TKDN	Orang	jumlah pelaku usaha	-	-	-	100	100	Terkait	-	Disdagperin	Disdagperin

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARG ET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
	(Permendagri, Inpres No. 2/2022, dll)				untuk pelaku usahan												
	Diperlukan suatu regulasi untuk mendorong para pengelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa (regulasi yang mendukung peingkatan penggunaan produk dalam negeri)	jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas		1 regulasi	mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN)	Dokumen	Jumlah regulasi daerah	-	-	1	-	1	Terkait	10,000,000	Bag PBJ	Bag PBJ
					1 kegiatan	Melakukan monev harga dan aktifitas penyedia di e-katalog	Kegiatan	pelaksanaan monev	-	-	-	1	1	Terkait	10,000,000	Bag PBJ	Bag PBJ
					1 Kegiatan	Melakukan penilaian kinerja penyedia oleh PPK di OPD Se-Kabupaten Lampung Selatan	Kegiatan	pelaksanaan penilaian kinerja penyedia	-	-	-	1	1	Terkait		Bag PBJ	Bag PBJ
Sumber Daya Manusia (SDM)	Belum seluruhnya SDM pengelola PBJ memiliki sertifikat kompetensi tertentu	Meningkatnya SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang memiliki sertifikat kompetensi tertentu	Tersedianya SDM Pengelola PBJ yang memiliki sertifikat kompetensi tertentu seperti Sertifikat Pejabat Pengadaan, PPK Tipe C dan PPK Tipe B	20 orang	Mengikuti bimtek/pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa	orang	Jumlah SDM PBJ yang telah memiliki sertifikat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sertifikat Kompetensi PP, PPK Tipe C dan PPK Tipe B)	5	5	-	10	20	Terkait	100,000,000	Bag PBJ	Bag PBJ	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 2025

---

RENCANA AKSI RB PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ASPEK	PERMASALA HAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI																
Pengawasan	Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Stabil	Stok Kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kab. Lampung Selatan	Pemantauan Harga dan stock Barang kebutuhan pokok dan barang penting	17 Kecamatan	Melakukan kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	Operasi Pasar dan pasar murah untuk mengendalikan harga, stok barang barang kebutuhan pokok dan barang penting	17 Kecamatan	-	-	17 Kecamatan	17 Kecamatan	Terkait Langsung	564.704.450	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bidang Perdagangan
Proses Bisnis dan SOP	Masih rendahnya cadangan pangan di masyarakat	Kelompok masyarakat yang memiliki lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan menerima bantuan gabah	1 kali	1. Pelatihan pengelolaan lumbung pangan	kali	Jumlah pelatihan pengelolaan lumbung pangan	-	-	1	-	1	Terkait langsung	-	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur sarana cadangan pangan yang layak	Kelompok pengelola lumbung di lokasi lomba Desa dan P3KSS	Jumlah lumbung pangan yang direhab	5 kelompok	2. Pemberian hibah gabah kepada kelompok	kelompok	Jumlah kelompok penerima hibah gabah	-	-	5	-	5	Terkait langsung	-	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang layak	Kelompok pengelola lumbung di lokasi lomba Desa dan P3KSS	Jumlah lantai jemur yang direhab	2 unit	Rehab lumbung pangan	unit	Jumlah lumbung pangan yang direhab	-	-	2	-	2	Terkait langsung	46.983.000	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
	Fluktuasi harga pangan	Kios pangan	Jumlah kegiatan monitoring harga pangan	36 OH	Monitoring harga pangan	Laporan	Jumlah laporan harga pangan	3	3	3	3	12	Terkait langsung	-	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Teknologi Informasi	Harga pangan belum terinfokan dengan baik dan menarik	Kantor DKP	Jumlah dasbord aplikasi harga	1 unit	Update Informasi harga di dasbord	Update harga pangan harian	Jumlah update harga pangan harian	12	12	12	12	48	Terkait langsung	-	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

ASPEK	PERMASALA HAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana
<b>RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI</b>																
	(Inovasi SIGAMPANG)															
Inovasi	Harga bahan pangan masih tinggi (Inovasi SIAPA GERANGAN)	Masyarakat miskin	Jumlah warga yang menerima subsidi harga	1700 warga	Pelaksanaan GPM Bersubsidi	warga	Jumlah warga penerima subsidi harga	200	500	500	500	1700	Terkait langsung	77.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Proses Bisnis dan SOP	<b>Rendahnya produksi perikanan tangkap</b>	Meningkatkan jumlah nelayan menggunakan cool box	Percentase peningkatan nelayan yang memanfaatkan cool box dibandingkan dengan tahun lalu	1.20%	Melakukan pemberian sarana Cool Box Untuk Nelayan	Unit	Jumlah sarana Cool Box yang diberikan kepada nelayan	-	-	24	-	24	Terkait	30.681.600,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	<b>Rendahnya sarana keselamatan nelayan dilaut</b>	Meningkatkan jumlah nelayan menggunakan alat keselamatan dilaut	Presentase Peningkatan nelayan yang memanfaatkan Life Jacket untuk keselamatan dilaut dibandingkan dengan tahun lalu	3 %	Melakukan pemberian bantuan sarana Life Jacket (Pelampung) untuk nelayan melaut	Unit	Jumlah unit Life Jacket yang diberikan kepada nelayan	-	60	-	-	60	Terkait	15.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	<b>Rendahnya Produksi Perikanan Budidaya</b>	Meningkatkan jumlah produksi budidaya ikan	Peningkatan jumlah tonnase perikanan budidaya dibandingkan tahun lalu	666.72 Ton	Melakukan pemberian hibah sarana dan prasarana budidaya air tawar	Paket	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	-	17	2	19	Terkait	760.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Proses Bisnis dan SOP	<b>Rendahnya Produksi Perikanan Budidaya</b>	Meningkatkan jumlah produksi budidaya ikan	Peningkatan jumlah tonnase perikanan budidaya dibandingkan tahun lalu	666.72 Ton	Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pembenihan Ikan Masyarakat (UPR)	Unit	Jumlah Unit Prasarana Budidaya yang dilakukan rehabilitasi	-	-	-	1	1	Terkait	175.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
					Melakukan pemberian hibah sarana dan prasarana		Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	-	2	-	2	Terkait	110.000.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

ASPEK	PERMASALA HAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI																	
					budidaya air payau												
					Melakukan Pemberian Bantuan sarana Pembenihan Ikan Air Tawar kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Paket	Jumlah paket bantuan yang disalurkan	-	-	1	-	1	Terkait	23.500.000,00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	
					Rendahnya Konsumsi Ikan di Kabupaten Lampung Selatan	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Lampung Selatan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Lampung Selatan	39,24 Kg/Kap/thn	Melakukan pemberian Ikan Konsumsi pada Keluarga beresiko stunting dan keluarga miskin	Kg	Jumlah bantuan yang disalurkan	-	-	-	500	500	Terkait
Proses Bisnis dan SOP	Masih rendahnya produksi pertanian komoditi terkait inflasi	Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian komoditi terkait inflasi	Tersedianya alat pertanian modern	100%	Pembagian alat pengolah tanah (hand traktor)	Unit	Jumlah alat	-	-	7	-	7	Terkait	279.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Proses Bisnis dan SOP	Belum optimalnya tingkat produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Menurunnya tingkat inflasi daerah	Peningkatan produksi	1.132.654 Ton	Pembangunan Jalan Usaha Tani yang dibangun	Paket	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	-	-	19	-	19	Terkait	3.800.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Unit	Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi	-	-	8	-	8	Terkait	1.600.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah sumur bor yang dibangun	-	-	4	-	4	Terkait	675.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pengembangan kawasan bawang merah	Ha	Jumlah areal pertanaman yang dikembangkan	-	3	-	-	3	Terkait	164.655.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pengembangan kawasan cabai	Ha	Jumlah areal pertanaman	-	10	-	-	10	Terkait	160.000.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	

ASPEK	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					Jenis kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dgn masayarakat Stokerholder Utama)	Jumlah Anggaran (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
						SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			Koordinator	Pelaksana	
<b>RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI</b>																	
							yang dikembangkan										
						Cadangan Benih Daerah untuk bencana	Kg	Benih Padi	-	-	16250	-	16250	Terkait	235.625.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun
Sumber Daya Manusia (SDM)	Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam melaksanakan GAP Bawang Merah	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	100%	Pelatihan GAP Bawang Merah	Orang	Jumlah peserta pelatihan	-	25	-	-	25	Terkait	5.346.800	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pelatihan GAP Cabai Merah Keriting	Orang	Jumlah peserta pelatihan	-	25	-	-	25	Terkait	5.346.800	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
					Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Orang	Jumlah peserta pelatihan	-	25	-	-	25	Terkait	4.846.800	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	
Inovasi	Pekarangan belum dimanfaatkan dengan baik : Inovasi Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Bertanam Buah dan Sayur (Gampang Berbusa)	Pemanfaatan pekarangan	Dimanfaatkananya pekarangan untuk bertanam buah dan sayur	100%	Pemberian bantuan benih sayuran kepada petani/masyarakat	Paket	Jumlah bibit sayuran yang diserahkan	-	-	3	-	3	Terkait	90.694.000	Dinas TPHBun	Dinas TPHBun	

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

SUPRIYANTO